

**ANALISIS PENGARUH FAKTOR
PERUSAHAAN, KUALITAS AUDIT, DAN
MEKANISME *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP PENERIMAAN
OPINI AUDIT *GOING CONCERN***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) Tahun 2007-2009)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

TEGUH HERI SETIAWAN

NIM. C2C607139

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Teguh Heri Setiawan

Nomor Induk Mahasiswa : C2C 607 139

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH FAKTOR
PERUSAHAAN, KUALITAS AUDIT, DAN
MEKANISME *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP
PENERIMAAN OPINI AUDIT *GOING
CONCERN***

Dosen Pembimbing : Dr. H. Abdul Rochman SE, MSi., Akt.

Semarang, 02 Mei 2011

Dosen Pembimbing,

(Dr. H. Abdul Rochman SE, MSi, Akt)

NIP. 19660108 199202 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Teguh Heri Setiawan

Nomor Induk Mahasiswa : C2C607139

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH FAKTOR PERUSAHAAN,
KUALITAS AUDIT DAN MEKANISME
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT
*GOING CONCERN***

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Mei 2011

Tim Penguji :

1. Dr. H. Abdul Rochman, SE. MSi, Akt. (.....)
2. Wahyu Meiranto, SE., MSi., Akt. (.....)
3. Drs. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Teguh Heri Setiawan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan, Kualitas Audit, Dan Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern* adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 02 Mei 2011

Yang membuat pernyataan,

(Teguh Heri Setiawan)

NIM. C2C607139

ABSTRACT

Good corporate governance mechanism is a concept that is based on agency theory, is expected to minimize agency problems between principals and agents. Implementation of good corporate governance mechanism is expected to increase the function of monitoring corporate decisions that will be increase performance and maintain the going concern of the entity. At this time, the auditor began his responsibilities are required to disclose information that isn't limited to things that are revealed in the financial statements, but also must disclosure information such as the existence and continuity of the entity. Auditors are expected to not only examine the financial statements or detect fraud, but also able to predict and assess the ability of companies in the hold of his life

This research aims to examine the influence of corporate factors, audit quality and corporate governance mechanisms on acceptance of going-concern audit opinion. The samples of this research are manufacturing company that listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2007-2009. Population of this research is 146 companies. Research sample amounts to 16 companies selected with purpose sampling method, with observation period of 3 years. The method that been used to analyses the correlation between variable are logistic regression method.

The results showed that companies have financial distress less likely to receive going-concern audit opinion. Companies that in the previous year receive a going concern audit opinion indicates there is a problem of continuity entity in the future so that the less likely to receive going concern audit opinion in the next year. The existence of a larger independent commissioner is able to provide better monitoring. This research provides evidence that financial distress and audit opinion the previous year have the positive correlation and significantly on acceptance of going concern audit opinion, independent commissioners have the negative correlation and significantly on acceptance of going concern audit opinion. But, the debt default, audit quality, institutional ownership, managerial ownership and audit committee have no relation with the acceptance of going concern.

Keywords: going concern, the company factor, audit quality, corporate governance mechanism

ABSTRAK

Mekanisme *good corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat meminimalkan masalah agensi antara principal dan agen. Penerapan mekanisme *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap keputusan perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan menjaga kelangsungan hidup entitas. Pada saat ini, auditor mulai diminta pertanggungjawabannya untuk mengungkapkan informasi yang tidak sebatas pada hal-hal yang ditampakan dalam laporan keuangan, tetapi juga harus mengungkapkan informasi seperti eksistensi dan kontinuitas entitas. Auditor diharapkan tidak hanya memeriksa laporan keuangan atau mendeteksi kecurangan, tetapi juga sanggup memprediksi dan menilai kemampuan perusahaan dalam melangsungkan hidupnya

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor perusahaan, kualitas audit, dan mekanisme *good corporate governance* terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2007-2009. Populasi penelitian ini sebanyak 146 perusahaan. Sampel penelitian berjumlah 16 yang dipilih dengan metode *purposive sampling* perusahaan dengan periode pengamatan 3 (tiga) tahun. Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel adalah metode regresi logistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* kemungkinan besar menerima opini audit *going concern*. Perusahaan yang pada tahun sebelumnya menerima opini audit *going concern* menunjukkan ada masalah terhadap kelangsungan hidup perusahaan kedepannya sehingga kemungkinan besar menerima opini audit *going concern* pada tahun selanjutnya. Adanya komisaris independen yang lebih besar mampu memberikan pengawasan yang lebih baik. Penelitian ini memberikan bukti bahwa *financial distress* dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*, komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Namun, *debt default*, kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Kata kunci : *going concern*, faktor perusahaan, kualitas audit, mekanisme *good corporate governance*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap”

(Qs. Alam Nasyrāh : 6-8)

“Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan sabar maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakān orang-orang berbuat baik”

(Q.S Yusuf: 90)

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Ar Ra'du: 11)

Kegagalan bukan berarti kehancuran, tetapi sebagai batu loncatan menuju sukses

(Phytagoras)

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

- ❖ *Ayah dan Bunda atas semua untaian doa dan dorongannya*
- ❖ *Adikku yang selalu menjadi semangat hidupku*
- ❖ *Kekasihku dan Sahabat-sahabatku yang telah mengajarku makna cinta dan persahabatan dalam hidup*
- ❖ *Orang-orang yang berarti dalam hidupku dan membuatku mengerti tentang makna kehidupan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur dan terima kasih selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi dan suri tauladan kami,. sehingga atas terselesaikannya Skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH FAKTOR PERUSAHAAN, KUALITAS AUDIT, DAN MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENERIMAAN AUDIT *GOING CONCERN*”.Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Terima kasih atas segala bimbingan, saran dan kerja sama dari banyak pihak selama pengerjaan skripsi ini. Sebelumnya, tidak lupa ucapan maaf yang sedalam-dalamnya jika terdapat kesalahan selama proses penelitian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Melalui tulisan yang sederhana jni, ucapan terima kasih ditujukan kepada :

1. Bapak Prof.. Drs. Mohamad Nasir, M. Si, Akt., Ph.D selaku dekan fakultas ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. Sudarno M.Si, Akt., selaku Dosen Wali yang telah sabar mendampingi dan membimbing penulis dan teman-teman akuntansi angkatan 2007
3. Bapak Dr. H. Abdul Rochman SE. M.Si, Akt., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapakku terhormat Zani,SE yang selama ini telah mencukupi segala kebutuhan pendidikan. Buat ibuku tercinta Rusmiyati yang selalu mendoakan dan membimbing saya agar tetap dijalan yang benar. Doa dan

5. dukunganmu adalah anugerah yang terindah yang saya miliki untuk menghadapi kehidupan ini
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, khususnya Jurusan Akuntansi atas bimbingan dan pengajaran yang diberikan dalam masa studi penulis. Seluruh staf, karyawan Fakultas Ekonomi yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dan pelayanan yang baik.
7. Pengelola Pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam memperoleh data.
8. Adikku tersayang Hendra Purnama DS dan Saskia yang telah menjadi motivator agar saya bisa lebih baik lagi. Semangat dan dukunganmu sangat berharga bagi penulis, maka jangan pernah putus asa untuk terus berusaha membahagiakan orang tua kita tercinta
9. My friend: suhael, mas mugil, mas fa'i, darmo, dan mas haris yang telah menemani penulis disaat susah dan senang selama ini. Azumar, lutfi, yang kamarnya menjadi tempat pelarian kalo kost sepi. Asman al faiz, pak bintoro yang telah menjadi teman suka, duka dan tukar pikiran
10. Winda Aryani terima kasih atas persahabatannya selama ini. Terima kasih atas semua dukungannya, bantuan, masukan, ide, dan doanya selama ini.
11. Teman-teman kertanegara depan kost : panji, aji, yoksun, ridwan, mas fais dan penghuni gelap didik terus jaga maen-maen dan kekompakannya.
12. Teman sekost tembalang : agung, maul dunkers, ahmad atas dukungannya dan juga penghuni baru panjul., yoyon, imam yang bikin kost jadi rame.
13. Teman-teman akuntansi : Budi, Nugroho, Nurseto, citra, dini, meymey, etha, dewa, riska, wenty, tifani, dhiban eka, ratna dan teman senasib dan seperjuangan Akuntansi angkatan 2007 atas kebersamaan dan semangatnya selama ini.
14. Teman KKN Rowosari terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Mei 2011

Penulis

Teguh Heri Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAKSI	v
MOTTO DAN PERSEMABAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
1.4 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Landasan Teori.....	21
2.1.1 Teori Agensi.....	21
2.1.2 Opini Audit	24

2.1.3 Opini Audit <i>Going Concern</i>	27
2.1.4 Kondisi Keuangan (<i>Financial Distress</i>)	32
2.1.5 <i>Debt Default</i>	39
2.1.6 Opini Audit Tahun Sebelumnya	40
2.1.7 Kualitas Audit	42
2.1.8 Mekanime <i>Good Corporate Governance</i>	44
2.1.8.1 Kepemilikan Institusional	48
2.1.8.2 Kepemilikan Manajerial	49
2.1.8.3 Komisaris Independen	50
2.1.8.4 Komite Audit.....	52
2.2 Penelitian Terdahulu	54
2.3 Kerangka Pemikiran	63
2.4 Pengembangan Hipotesis	65
BAB III METODE PENELITIAN	80
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	80
3.1.1 Variabel Dependen.....	80
3.1.2 Variabel Independen.	80
3.1.2.1 Kondisi Keuangan (<i>Financial Distress</i>).....	81
3.1.2.2 <i>Debt Default</i>	82
3.1.2.3 Opini Audit Tahun Sebelumnya.....	83
3.1.2.4 Kualitas Audit.....	83
3.1.2.5 Kepemilikan Institusional.....	84
3.1.2.6 Kepemilikan Manajerial	84

3.1.2.7 Komisaris Independen	84
3.1.2.8 Komite Audit	85
3.2 Populasi dan Sampel	86
3.3 Jenis dan Sumber Data	87
3.4 Metode Pengumpulan Data	87
3.5 Analisis Data	88
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	88
3.5.2 Analisis Inferensial	90
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	92
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	92
4.2 Analisis Data	95
4.2.1 Statistik Deskriptif	95
4.2.2 Uji Hipotesis	100
4.2.2.1 Menguji Kelayakan Model Regresi	100
4.2.2.2 Menilai Keseluruhan Model	101
4.2.2.3 Koefisien Determinasi	102
4.2.2.4 Pengujian <i>Multikolinearitas</i>	103
4.2.2.5 Matrik Klasifikasi	105
4.2.2.6 Menguji Koefisien Regresi	106
4.2.3 Pengujian Hipotesis	107
4.3 Interpretasi Hasil	109
BAB V PENUTUP	120
5.1 Kesimpulan	120

5.2 Keterbatasan.....	122
5.3 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kriteria Titik <i>Cutoff</i> Model <i>Z Score</i>	39
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	59
Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria	92
Tabel 4.2 Daftar Perusahaan Sampel	93
Tabel 4.3 Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Usaha.....	94
Tabel 4.4 Analisis Statistik Deskriptif Seluruh Sampel.....	95
Tabel 4.5 Analisis Statistik Deskriptif Sampel <i>Going Concern</i>	96
Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif Sampel <i>Non Going Concern</i>	96
Tabel 4.7 Uji HOSMER dan LEMESHOW	101
Tabel 4.8 Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir.....	102
Tabel 4.9 Nilai <i>Nagelkerke R Square</i>	103
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	104
Tabel 4.11 Hasil Uji Matriks Klasifikasi	105
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik.....	106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	64

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel.....	129
Lampiran B Data output SPSS	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan utama audit adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan Pernyataan Akuntansi Berterima Umum (GAAP) (Boynton, *et al* 2003). Terjadinya kasus manipulasi data keuangan yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Worldcom, Xerox, Enron dan lain-lain pada akhirnya menyebabkan profesi akuntan banyak mendapat kritikan, sehingga berdampak pada kurangnya keyakinan terhadap kualitas auditor. Auditor sebagai pihak yang independen dalam audit atas laporan keuangan suatu perusahaan, dianggap ikut memberikan informasi yang salah, sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, maka *American Institute of Certified public Accounting* mensyaratkan bahwa auditor harus mengemukakan secara eksplisit apakah perusahaan klien akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai setahun kemudian setelah pelaporan (Januarti, 2009).

Di Indonesia, isu mengenai laporan auditor dan hubungannya dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan sudah timbul sejak tahun 1995. Isu ini muncul ditandai dengan runtuhnya Bank Summa, meskipun bank telah mengeluarkan laporan audit yang disajikan secara wajar pada tahun sebelumnya, ternyata tidak menjamin kelangsungan hidup entitas tersebut. Sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 di Indonesia, isu kelangsungan hidup perusahaan

semakin menjadi sorotan publik. Perekonomian mengalami keterpurukan, sehingga banyak perusahaan yang bangkrut karena tidak bisa melanjutkan usahanya. Bukti menunjukkan bahwa, pada tahun 1997 sebanyak 14 perusahaan dan 15 perusahaan ditahun 1998 telah mengeluarkan laporan audit yang disajikan secara wajar pada tahun sebelumnya, namun runtuh pada tahun berikutnya (Haron, *et al.*, 2009). Sehingga, perkembangan kasus tentang kelangsungan hidup yang terjadi, sangat menarik akademisi untuk melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhinya.

Masih banyaknya kasus tentang manipulasi data keuangan yang tidak dapat dideteksi dan informasi mengenai kelangsungan hidup yang belum diungkapkan oleh auditor menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap auditor itu sendiri. Auditor sebagai pihak independen yang diharapkan mampu mendeteksi kecurangan dan mengungkapkan informasi mengenai perusahaan secara menyeluruh, belum mampu melakukan perkerjaan dengan baik. Sehingga apabila masalah ini terus berlanjut akan berdampak pada hilangnya kepercayaan terhadap auditor, selain itu juga akan menyebabkan kerugian banyak pihak seperti *stakeholder* dan *shareholder*. Dengan demikian, topik mengenai *going concern* sangat menarik untuk dilakukan penelitian karena masih sering terjadi dan berhubungan dengan kepentingan banyak pihak.

Topik mengenai bagaimana tanggung jawab auditor dalam mengungkapkan masalah *going concern* masih menarik untuk diteliti diungkapkan oleh Ruiz Barbadillo *et al.*, (dalam Setyarno *et al.*, 2006). Independensi auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit

juga harus mempertimbangkan *going concern* perusahaan yang diaudit. *Going concern* merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (Standar Akuntansi Keuangan, 2009).

Going concern (kelangsungan hidup) merupakan asumsi kelangsungan hidup dalam pelaporan keuangan suatu entitas, sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi sebaliknya maka entitas tersebut menjadi bermasalah. *Going concern* berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai satu periode atau satu tahun kedepan. Jika perusahaan dinilai tidak mampu mempertahankan kelangsungan hidup untuk satu tahun kedepan maka *going concern* perusahaan diragukan. Dengan demikian, *going concern* diartikan sebagai kelangsungan hidup suatu badan usaha (Petronila, 2004).

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyebutkan, bahwa pertimbangan auditor atas kemampuan kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya harus berdasarkan pada kemampuan penilaian. Penilaian tersebut didasarkan pada kesangsian dalam diri auditor itu sendiri terhadap kemampuan suatu kesatuan usaha (Saefudin dan Pamudji, 2004). Meskipun auditor tidak bertanggungjawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang dan kelangsungan hidup (*going concern*) sebuah perusahaan tetapi dalam melakukan proses audit, kelangsungan hidup perlu menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini auditnya.

Opini audit merupakan pernyataan pendapat auditor terhadap kewajaran laporan keuangan berdasarkan atas audit yang dilaksanakan dengan menggunakan standard auditing dan atas temuan-temuannya. Terdapat lima opini yang diberikan oleh auditor berdasarkan hasil pengauditan atas laporan keuangan kliennya yaitu *unqualified opinion, unqualified opinion with explanation language, qualified opinion, adverse opinion, and disclaimer opinion*. Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum (SPAP, 2001).

Dalam pelaksanaan proses audit, auditor dituntut tidak hanya melihat sebatas pada hal-hal yang ditampakkan dalam laporan keuangan, tetapi juga harus melihat hal-hal lain seperti: masalah eksistensi dan kontinuitas entitas. Hal ini dikarenakan, seluruh aktivitas atau transaksi yang telah terjadi dan yang akan terjadi secara implisit terkandung di dalam laporan keuangan (Solikah, 2007). Pada saat auditor menetapkan bahwa ada keraguan yang besar terhadap kemampuan klien untuk melanjutkan usahanya (*going concern*), auditor perlu menyampaikan kondisi tersebut dalam laporan auditnya (Petronila, 2007). Dengan adanya keragu-raguan perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor dapat memberikan opini *going concern* (opini modifikasi) (Januarti, 2009).

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Pemberian status *going concern* bukanlah suatu tugas

yang mudah (Koh dan Tan, 1999 dalam Januarti, 2009). Dalam pemberian opini *going concern* sering kali timbul masalah dalam diri auditor, yaitu sangat sulit untuk memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan sehingga banyak auditor mengalami dilema antara moral dan etika dalam memberikan opini *going concern*. Venuty (2007) menyatakan penyebab masalah tersebut adalah adanya hipotesis *self-fulfilling prophecy* yaitu bahwa apabila auditor memberikan opini *going concern*, maka perusahaan akan menjadi cepat bangkrut karena banyak investor yang akan membatalkan investasinya atau kreditor yang menarik dananya. Selain itu, disebabkan karena tidak tersedianya prosedur penetapan status *going concern* yang terstruktur dan sistematis (Joanna H. Lo, 1994 dalam Januarti, 2009).

Pada dasarnya masalah *going concern* terbagi menjadi dua: pertama, masalah keuangan yang meliputi defisiensi likuiditas, defisiensi ekuitas, penunggakan utang, kesulitan memperoleh dana. Kedua, masalah operasi yang meliputi kerugian operasi yang terus menerus, prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam dan pengendalian yang lemah atas operasi (Altman dan Mc Gough, 1974 dalam Prapitorini dan Januarti, 2007). Kriteria perusahaan akan menerima opini *going concern* apabila mempunyai masalah pada pendapatan, reorganisasi, ketidakmampuan dalam membayar bunga, menerima opini *going concern* tahun sebelumnya, dalam proses likuidasi, modal yang negatif, arus kas negatif, pendapatan operasi negatif, modal kerja negatif, 2 s/d 3 tahun berturut-turut rugi, laba ditahan negatif (Mutchler, 1985 dalam Januarti, 2009). Sehingga perusahaan yang mengalami

masalah dalam keuangan dan operasi cenderung akan masuk kedalam kriteria perusahaan yang akan menerima opini audit *going concern*.

Fitrianasari dan Januarti (2008) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi auditor dalam pemberian status opini *going concern* diantaranya, didasarkan pada analisis rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio pertumbuhan penjualan dan rasio nilai pasar. Sedangkan analisis non keuangan seperti ukuran perusahaan, reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), auditor *client-tenure*, opini audit tahun sebelumnya, dan *audit lag*. Berdasarkan analisis keuangan dan non keuangan, jika perusahaan masuk dalam kriteria perusahaan yang mengalami masalah *going concern* maka auditor dapat memberikan opini audit *going concern*. Dengan demikian, faktor perusahaan yang didasarkan pada analisis keuangan dan non keuangan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Faktor perusahaan didefinisikan sebagai faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*. Januarti (2009) mengemukakan bahwa faktor perusahaan meliputi *financial distress*, *debt default*, ukuran perusahaan, *audit lag*, opini tahun sebelumnya, *audit client tenure* dan *opinion shopping*. Dalam penelitian ini, faktor perusahaan yang didasarkan pada analisis keuangan yaitu *financial distrees* dan *debf default* sedangkan yang didasarkan pada analisis non keuangan yaitu opini audit sebelumnya.

Faktor perusahaan seperti *financial distress*, *debt default* dan opini audit sebelumnya akan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), *debt default* dan mendapat opini audit *going concern* tahun sebelumnya akan cenderung menerima opini audit *going concern*. Penerimaan opini audit *going concern* selain dipengaruhi oleh faktor perusahaan (*financial distress*, *debt default* dan opini tahun sebelumnya) juga dipengaruhi oleh kualitas audit, dan mekanisme *good corporate governance* sehingga atas dasar variabel tersebut jika perusahaan menunjukkan kelangsungan hidup diragukan, maka perusahaan cenderung akan menerima opini audit *going concern*.

Linoputri (2010) menyatakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini *going concern* oleh auditor didasarkan pada kondisi internal perusahaan, seperti kualitas audit, *debt default* dan ukuran perusahaan. Banyak peneliti yang mengungkapkan bahwa kondisi keuangan (*financial distress*) merupakan faktor yang banyak dipakai auditor sebagai dasar memberikan opini audit *going concern*. Mc Keown *et al.*, (1991) dalam Januarti (2009) menemukan bukti bahwa auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini *going concern* pada perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

Ross *et al.*, (2002) dalam Fitrianasari dan Januarti (2008) menyatakan bahwa kesulitan keuangan (*financial distress*) akan menyebabkan perusahaan mengalami gangguan dalam keuangan seperti: arus kas negatif, rasio keuangan yang buruk, dan gagal bayar pada perjanjian utang. Pada akhirnya, kesulitan keuangan ini akan mengarah pada *going concern* diragukan. Santosa dan Wedari (2007) menemukan bukti bahwa jika kondisi perusahaan baik maka kemungkinan

kecil perusahaan tersebut akan mendapat opini *going concern*. Pada perusahaan yang kinerja keuangan buruk banyak ditemukan masalah *going concern* (Ramadhany, 2004). Hal ini bertentangan dengan penelitian Januarti (2009) bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*.

Debt default merupakan salah satu indikasi yang banyak digunakan oleh auditor untuk menilai kesulitan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, seperti perjanjian utang atau kegagalan utang. Chen dan Church (1992) menyatakan bahwa kesulitan perusahaan dalam memenuhi persetujuan utang, lalai dalam pembayaran, dan pelanggaran memperjelas masalah *going concern* suatu perusahaan. Auditor dalam memberikan opini audit *going concern* akan mempertimbangkan status *default* seperti dalam Standar Profesional Akuntan publik seksi 341. Januarti (2009) menemukan bukti bahwa *debt default* berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*. Apabila perusahaan tidak mampu menyelesaikan kewajibannya maka kemungkinan besar perusahaan tersebut akan menerima opini *going concern*. Praptitorini dan Januarti (2007) juga mengungkapkan bahwa sebagian besar perusahaan yang mendapat status *debt default* adalah perusahaan yang menerima opini audit *going concern*.

Auditee yang menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya akan dianggap memiliki masalah terkait dengan kelangsungan hidupnya, sehingga semakin besar kemungkinan bagi auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern* pada tahun berjalan. Rahmadhany (2004); Setyarno *et al.*, (2006); Praptitorini dan Januarti (2007); dan Januarti (2009), ada hubungan positif yang

signifikan antara opini audit *going concern* tahun sebelumnya dengan opini audit *going concern* tahun berjalan. Apabila tahun sebelumnya mendapat opini *going concern* maka kemungkinan besar akan mendapat opini *going concern* pada tahun berikutnya, mengingat untuk memperbaiki kinerja perusahaan dibutuhkan waktu relatif lama.

Kualitas auditor dapat di gambarkan dengan hasil audit yang berkualitas. Auditor yang memiliki kualitas audit yang baik cenderung akan memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan yang mengalami masalah mengenai *going concern* (Santosa dan Wedari, 2007). Mutcler *et, al.* (1997) dalam Santosa dan Wedari (2007) menemukan bukti bahwa auditor berskala besar yang tergabung pada *big 6* cenderung memberikan opini *going concern* dibandingkan auditor *non big 6*. Namun, Fanny dan Saputra (2005) menyatakan bahwa besar kecilnya kantor akuntan publik tidak akan mempengaruhi dalam pemberian opini audit.

Selain faktor-faktor tersebut, mekanisme *corporate governance* secara tidak langsung juga memiliki andil dalam pemberian status *going concern* suatu perusahaan. Pelaksanaan *corporate governance* yang buruk dapat berimplikasi pada rendahnya minat investor atau kreditur untuk menyalurkan investasi atau kreditnya, karena adanya peningkatan resiko investasi (Hidayah, 2008). Hal ini dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan yang berimplikasi pada terganggunya kelangsungan hidup perusahaan.

Manipulasi data keuangan merupakan masalah yang timbul antara manajer dan *shareholder* yang biasa disebut sebagai masalah agensi. Masalah ini timbul karena sebagai *agent*, manajer secara moral bertanggung jawab untuk

mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun disisi yang lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Adanya asumsi bahwa manajer maupun pemilik mementingkan kepentingan sendiri, sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Beberapa kasus skandal akuntansi tentang manipulasi data keuangan yang mengganggu kelangsungan hidup suatu perusahaan, sangat relevan bila ditarik benang merah dari segi tata kelola perusahaan (*corporate governance*). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengungkapkan *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Dengan menerapkan *good corporate governance* diharapkan dapat mengurangi kesempatan manajer untuk melakukan tindakan manipulasi. Sehingga kinerja yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan bersangkutan (Jensen, 1993 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Perusahaan dengan pertumbuhan yang positif memberikan suatu tanda bahwa ukuran perusahaan

tersebut semakin berkembang dan mengurangi kecenderungan kearah kebangkrutan (Januarti, 2009).

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) menjelaskan agar pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik, maka perusahaan harus mendasarkan pengelolaan perusahaan berdasar pada prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accoutanbility*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Perusahaan yang besar cenderung telah menerapkan *corporate governance* berdasarkan prinsip *good corporate governance* yang berimplikasi pada peningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga, perusahaan yang telah menerapkan prinsip GCG kemungkinan kecil akan mendapat opini audit *going concern*.

Untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau arah kebijakan yang ditetapkan maka diperlukan suatu mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* dapat diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak pengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme diarahkan untuk menjamin dan mengawasi jalannya sistem *governance* dalam suatu perusahaan (Syakhoraza, 2002a, 2002b; *World Bank*, 1999; Kim dan Nofsinger, 2004 dalam Petronila, 2007).

Syakhoraza (2005) dalam Petronila (2007) membedakan *corporate governance mechanism* menjadi dua kelompok yaitu *internal corporate*

governance mechanism dan *external corporate governance mechanism*. Pertama, mekanisme *Corporate Governance* yang bersifat internal merupakan interaksi antara pihak-pihak pengambil keputusan dalam perusahaan yang mencakup Dewan Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commisioner*), *Executive Management* yang di dalamnya termasuk Komite Audit (*Audit Committee*), dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kedua, mekanisme *Corporate Governance* yang bersifat eksternal merupakan interaksi antara pihak-pihak yang mengawasi kinerja perusahaan, antara lain *Stakeholders* (karyawan, konsumen, pemasok, kreditur, masyarakat) dan *reputational agents* (akuntan, pengacara, badan pemeringkat kredit, manajer investasi). S. Beiner *et al*, (2003) dalam Wulandari, (2006) mengemukakan bahwa indikator mekanisme *internal corporate governance* terdiri dari jumlah dewan direktur, proporsi dewan komisaris independen, dan *debt to equity*. Sedangkan indikator mekanisme eksternal *corporate governance* terdiri dari *institutional ownership*.

Menurut Wening (2007) dalam Sabrinna (2010), kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Short dan Keasy (1999), Morek *et al.*, (1998), Mc Connell dan Servaes (1990, 1995) serta Kole (1995) dalam Januarti (2009) menyatakan semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan, dengan demikian diharapkan akan ada monitoring atas keputusan manajemen. Adanya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, akan mendorong kinerja manajemen agar lebih baik atau sesuai yang diharapkan

investor, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan pemegang saham. Parker *et al.* (2005) dalam Petronila (2007) menunjukkan bahwa hubungan antara kepemilikan anggota dewan dengan opini *going concern* berbanding terbalik. Adanya prosentase kepemilikan anggota dewan dalam perusahaan semakin besar maka anggota dewan tersebut akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan karena merasa memiliki perusahaan sehingga berusaha untuk tetap dapat mempertahankan eksistensi perusahaan dan berkembang melalui peningkatan pengendalian (Petronila, 2007). Berbeda dengan penelitian Januarti (2009) yang menemukan bahwa meskipun ada kepemilikan manajerial dan institusional ternyata fungsi pengawasan yang ada belum menjamin untuk tidak diberikannya opini audit *going concern*, karena untuk kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

Salah satu ciri khas dalam *Good Corporate Governance* (GCG) adalah adanya keberadaan komisaris independen (Petronila, 2007). Komisaris independen diharapkan mampu memberikan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip utama untuk menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang sering terabaikan seperti pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya (Linoputri, 2010). Petronila (2007) menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen dapat

menyeimbangkan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder*, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi auditor dalam pemberian opini audit *going concern*. Hal ini bertentangan dengan penelitian Ramadhany (2004) dan Linoputri (2010) yang menemukan bukti empiris bahwa proporsi komisaris independen dalam anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*.

Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris dapat dibantu oleh komite audit. Komite audit berfungsi untuk meningkatkan fungsi audit internal dan eksternal dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Linoputri, 2010). Carcello dan Neal (2000) dalam Ramadhany (2004) menyatakan bahwa keberadaan *inside* dan *grey director* (komisaris/direktur yang berasal dari manajemen) dapat mengurangi kemungkinan penerimaan opini audit *going concern* pada komite audit perusahaan yang mengalami *financial distress*. Penelitian Salterio (2001) dan Abbot (2004) dalam Masyitoh dan Adhariani (2010) mendukung bahwa komite audit dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam hubungannya dengan karakteristik komite audit dan indikator kualitas dalam laporan keuangan. Penelitian Linoputri (2010) tidak menemukan perbedaan antara perusahaan yang membentuk dan tidak membentuk komite audit. Hal ini sejalan dengan Masyitoh dan Adhariani (2010) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh komite audit terhadap penerimaan opini *going concern*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menguji kembali faktor-faktor

yang berpengaruh terhadap opini audit *going concern* karena adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*) pada penelitian–penelitian sebelumnya. Selain itu, untuk menemukan bukti empiris mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*. Peneliti menggunakan variabel faktor perusahaan (*financial distress, debt default* dan opini audit sebelumnya), kualitas audit dan mekanisme *good corporate governance*, karena opini audit yang diterima perusahaan (penerimaan opini audit *going concern*) dipengaruhi oleh kondisi variabel-variabel tersebut. Berdasarkan variabel tersebut jika kelangsungan hidup perusahaan diragukan maka perusahaan cenderung akan menerima opini audit *going concern*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan faktor mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu kepemilikan institusional dan manajerial, proporsi komisaris independen serta komite audit. Tujuannya agar diperoleh bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme GCG dalam perusahaan manufaktur di Indonesia terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Selain itu untuk mengetahui keefektifan fungsi monitoring yang diterapkan perusahaan melalui mekanisme *good corporate governance*.

Penelitian ini mengambil sampel yang berasal dari sektor industri manufaktur. Sektor manufaktur dipilih karena sektor tersebut memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian dengan memberikan kontribusi yang paling besar dalam nilai ekspor Indonesia. Selain itu sektor manufaktur juga memiliki tingkat kompetisi yang kuat sehingga rawan terhadap kasus-kasus

kecurangan dalam keuangan yang berimplikasi pada kelangsungan hidup yang diragukan. Kelangsungan hidup industri manufaktur sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia karena secara tidak langsung *going concern* industri manufaktur ikut mendorong peningkatan perekonomian.

Masalah *going concern* dapat dicegah dan diatasi salah satunya dengan adanya suatu aturan yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi perusahaan. Dalam hal ini aturan yang digunakan adalah suatu tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Salah satu manfaat *Good Corporate Governance* adalah menjaga *going concern* perusahaan (“Manfaat Kualitas Laporan Keuangan di dalam Menunjang Tercapainya *Good Corporate Governance*”) (Linoputri, 2010). Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan, Kualitas Audit, Dan Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur?
2. Apakah faktor *debt default* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur?

3. Apakah faktor opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur?
4. Apakah faktor kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur?
5. Apakah faktor kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur?
6. Apakah faktor kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur?
7. Apakah faktor Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur?
8. Apakah faktor komite audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur
2. Menganalisis pengaruh *debt default* perusahaan auditan terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur.
3. Menganalisis pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur.

4. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur.
5. Menganalisis pengaruh kepemilikan instutusional terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur.
6. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur.
7. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur.
8. Menganalisis pengaruh jumlah komite audit terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Pemberi pinjaman (Kreditur)

Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman, dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada.

2. Investor

Investor saham dan obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. Investor yang menganut strategi aktif akan mengembangkan model

prediksi kebangkrutan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian mengantisipasi kemungkinan tersebut.

3. Akuntan

Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan satuan usaha karena akuntan akan melihat kemampuan *going concern* suatu perusahaan. Penelitian ini dapat sebagai pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur.

4. Manajemen

Mengantisipasi timbulnya biaya-biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* secara efektif yang dapat mengurangi masalah *going concern*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

Bab I : **PENDAHULUAN**

Berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II : **TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

Bab III : **METODE PENELITIAN**

Berisi penjelasan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data dari variabel penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, metode analisis dalam penelitian.

Bab IV : **HASIL DAN ANALISIS**

Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan serta pembahasan.

Bab V : **PENUTUP**

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Kemudian, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi

Perspektif teori agensi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara isu *going concern* dan *good corporate governance*. Jensen dan Meckling, (1976) menggambarkan adanya hubungan kontrak antara pemilik (*Principal*) dengan agen (manajemen). Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara *principal* dan agen (Jensen dan meckling, 1976). Konflik tersebut terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Biaya keagenan adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik untuk memastikan manajemen bertindak sesuai dengan yang diharapkan *principal*.

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih pemilik (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa kepada *principal* dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Eisenhardt, (1989) dalam Ujiyantho dan pramuka, (2007) menjabarkan teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*) dengan mengabaikan

kepentingan orang lain, (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) bahwa manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Oleh karena itu, manajer sebagai manusia akan selalu bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan pihak lain (Haris, 2004).

Manajer sebagai pihak yang mengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi tentang kondisi perusahaan dan prospek perusahaan di masa mendatang dibandingkan dengan pemilik (*principal*). Manajemen bertanggung jawab untuk melaporkan segala informasi mengenai kondisi dan prospek perusahaan yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemilik. Akan tetapi, terkadang informasi yang disampaikan oleh manajer tidak menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya, sehingga akan berimplikasi pada kelangsungan hidup (*going concern*) yang diragukan. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*) (Haris, 2004). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manipulasi laba sehingga akan merugikan pemilik dan juga mengganggu kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan (Richardson, 1998 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Teori agensi berkaitan dengan asumsi bahwa baik pemilik maupun agen diasumsikan mempunyai rasionalisasi ekonomi dan semata-mata hanya mementingkan kepentingan sendiri saja. Agen diharapkan memberikan informasi yang disajikan secara wajar, tetapi agen mungkin takut mengungkapkan informasi

yang tidak diharapkan pemilik, sehingga terdapat kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan (Januarti, 2009). Secara tidak langsung manajer berusaha menyampaikan informasi seperti yang diharapkan pemilik dengan mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan kedepannya. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus dan tidak dapat terdeteksi oleh pemilik dan auditor, maka akan merugikan pemilik dan juga mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

Good Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat meminimalkan masalah agensi antara *principal* dan agen dengan memberikan keyakinan terhadap pihak *principal* atas kinerja agen. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan, serta menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Selain itu, berkaitan dengan dana (kapital) yang telah ditanamkan oleh investor, serta bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997 dalam Herawaty 2008). Dengan kata lain, *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) dan juga masalah *going concern*.

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Herawaty (2008) menyatakan bahwa angka-angka yang dibuat dalam laporan keuangan diharapkan dapat mengurangi konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Pemilik dapat menilai, mengukur dan mengawasi sejauh mana kinerja yang dilakukan manajer untuk kepentingannya dan juga sebagai dasar untuk pemberian kompensasi atas kinerja manajer. Penilaian ini dapat dilakukan melalui laporan keuangan yang dibuat oleh

manajemen sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya. Dalam hal ini, dibutuhkan pihak ketiga yang independen (akuntan publik) yang bertugas memberikan jasa untuk menilai laporan keuangan yang dibuat oleh agen, dengan hasil opini audit (Januarti, 2009). Akuntan publik diharapkan dapat memberikan informasi yang disajikan secara wajar yang menggambarkan keadaan sebenarnya atas kondisi perusahaan yang di auditnya.

2.1.2 Opini Audit

Auditor sebagai pihak yang independen dalam penilaian laporan keuangan ditugasi untuk memberikan opini atas laporan keuangan itu sendiri. Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum (SPAP, 2001).

Terdapat lima jenis pendapat yang dapat diberikan auditor (Mulyadi, 2002; Halim, 2003 dalam Setiawan, 2006) yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan

tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (*unqualified opinion with explanatory language*)

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas atau bahasa penjelas yang lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraph penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum.
- b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup.
- c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- d. Penekanan atas suatu hal.
- e. Laporan audit yang melibatkan auditor lain

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditee menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan kepada perusahaan yang berada dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit.
- b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan dia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

4. Pendapat tidak Wajar (*adverse opinion*)

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan auditee tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

5. Tidak memberikan pendapat (*disclaimer of Opinion*)

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika dia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila dia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Pernyataan diberikan apabila:

- a. Ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu.
- b. Auditor tidak independen terhadap klien.

Laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh proses audit. Opini audit yang diberikan oleh auditor harus melalui beberapa tahap audit yang dilakukan sehingga auditor dapat memberi kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diberikan atas laporan keuangan yang

diauditnya (Arens, 1996 dalam Petronila, 2004). Dengan demikian, auditor dalam memberikan opini sudah didasarkan pada keyakinan profesionalnya.

2.1.3 Opini Audit *Going concern*

Meskipun auditor tidak bertanggungjawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang (kelangsungan hidup) sebuah perusahaan, tetapi dalam melakukan audit kelangsungan hidup perlu menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini auditnya. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyebutkan, bahwa pertimbangan auditor atas kemampuan kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya harus berdasarkan pada kemampuan penilaian. Penilaian tersebut didasarkan pada kesangsian dalam diri auditor itu sendiri terhadap kemampuan suatu kesatuan usaha (Saefudin dan pamudji, 2004).

Going concern (kelangsungan hidup) merupakan asumsi kelangsungan hidup dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi sebaliknya, entitas tersebut menjadi bermasalah. Menurut belkaoui (2000) dalam Ramadhany (2004) *going concern* merupakan suatu asumsi yang menyatakan bahwa suatu entitas akan menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang lama untuk menjalankan proyek, tanggung jawab serta aktivitasnya tanpa henti. Dengan demikian, *going concern* diartikan sebagai kelangsungan hidup suatu badan usaha (Petronila, 2004).

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) memberikan pedoman bahwa auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai

kemampuan entitas dalam mempertahankan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas dengan cara:

- a. Mengumpulkan informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung yang mengurangi kesangsian auditor. Memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor.
- b. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus :
 1. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 2. Menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut secara efektif dilaksanakan
- c. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian yang besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Langkah yang dapat diambil auditor dalam pemberian opini audit berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap rencana manajemen sebagai berikut:

- a. Jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat.

- b. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan efektivitas rencana tersebut.
1. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut tidak efektif, auditor menyatakan tidak memberikan pendapat.
 2. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 3. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor memberikan pendapat tidak wajar.

Selama pelaksanaan audit, auditor diharapkan mampu melihat hal-hal selain yang ditampakkan dalam laporan keuangan seperti masalah eksistensi dan kontinuitas entitas. Seluruh aktivitas atau transaksi yang telah terjadi dan yang akan terjadi secara implisit terkandung di dalam laporan keuangan (Solikah, 2007). Laporan keuangan harus mampu memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan yang sudah terjadi dan akan terjadi. Pada saat auditor menetapkan bahwa ada keragu-raguan yang besar terhadap kemampuan klien untuk melanjutkan usahanya (*going concern*), auditor perlu menyampaikan kondisi tersebut dalam laporan auditnya (Petronila, 2007). Dengan adanya keragu-raguan perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor dapat memberikan opini *going concern* (opini modifikasi)

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan

hidupnya dalam jangka waktu yang ditentukan (SPAP, 2001). Pemberian status *going concern* bukanlah suatu tugas yang mudah (Koh dan Tan, 1999 dalam Januarti 2009). Venuty (2007) menyatakan bahwa penyebab masalah tersebut adalah adanya hipotesis *self-fulfilling properchy* yang menyatakan bahwa apabila auditor memberikan opini *going concern*, maka perusahaan akan menjadi cepat bangkrut karena banyak kreditor yang menarik dananya atau investor yang akan membatalkan investasinya. Penyebab lainnya adalah tidak tersedianya prosedur penetapan status *going concern* yang terstruktur dan sistematis (Joanna H. Lo, 1994 dalam Januarti, 2009). Selain itu, sangat sulit untuk memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan sehingga banyak auditor mengalami dilema antara moral dan etika dalam memberikan opini *going concern*.

(SPAP seksi 341) “Auditor dapat mengidentifikasi informasi mengenai kondisi atau peristiwa tertentu yang menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, yaitu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Beberapa kondisi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian opini audit *going concern*:

1. Trend negatif, sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, *rasio* keuangan penting yang buruk.
2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, sebagai contoh, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utang atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.
3. Masalah intern, sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.
4. Masalah luar yang telah terjadi, sebagai contoh, pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, kehilangan *franchise*, lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan

atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar, seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan, namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

Menurut Altman dan McGough (1974) dalam Prapitorini dan Januarti (2007), masalah *going concern* dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Masalah keuangan yang meliputi defisiensi likuiditas, defisiensi ekuitas, penunggakan utang, kesulitan memperoleh dana.
2. Masalah operasi yang meliputi kerugian operasi yang terus menerus, prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam dan pengendalian yang lemah atas operasi.

Mutchler (1985) dalam Januarti (2009), mengungkapkan beberapa kriteria perusahaan akan menerima opini audit *going concern*. Kriteria tersebut adalah apabila mempunyai masalah pada pendapatan, reorganisasi, ketidakmampuan dalam membayar bunga, menerima opini *going concern* tahun sebelumnya. Selain itu, perusahaan yang sedang dalam proses likuidasi, mempunyai modal yang negatif, arus kas negatif, pendapatan operasi negatif, modal kerja negatif, 2 s/d 3 tahun berturut-turut rugi, dan laba ditahan negatif.

Fitrianasari dan Januarti (2008) ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemberian status opini *going concern*. Faktor yang didasarkan pada analisis rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio *lverage*, rasio pertumbuhan penjualan dan rasio nilai pasar. Sedangkan analisis non keuangan yaitu ukuran perusahaan, reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), auditor *client-tenure*, opini audit tahun sebelumnya, dan *audit lag*. Berdasarkan

analisis keuangan dan non keuangan didapat faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Faktor perusahaan seperti *financial distress*, *debt default* dan opini audit sebelumnya akan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), *debt default* dan mendapat opini audit *going concern* tahun sebelumnya akan cenderung menerima opini audit *going concern*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mengalami *financial distress*, mendapat status *default* dan menerima opini audit *going concern* tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa adanya keraguan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) (Januarti, 2009). Penerimaan opini audit *going concern* selain dipengaruhi oleh faktor perusahaan (*financial distress*, *debt default* dan opini tahun sebelumnya) juga dipengaruhi kualitas auditor, dan mekanisme *good corporate governance* sehingga atas dasar variabel tersebut jika perusahaan menunjukkan kelangsungan hidup perusahaan diragukan, maka perusahaan cenderung akan menerima opini audit *going concern*.

2.1.4 Kondisi Keuangan (*Financial Distress*)

Kondisi keuangan perusahaan adalah suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu. Kondisi keuangan merupakan gambaran atas kinerja sebuah perusahaan dalam suatu periode kerja (Siahaan, 2010). Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca,

perhitungan laba rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya.

Hofer (1980:20) dan Whitaker (1999:124) dalam (Endri, 2009) mengumpamakan kondisi *financial distress* sebagai suatu kondisi dari perusahaan yang mengalami laba bersih (*net profit*) negatif selama beberapa tahun. Mc Keown (1991) dalam Januarti (2009) juga mengemukakan perusahaan yang tidak pernah mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), auditor tidak pernah memberikan opini audit *going concern*. Sebaliknya, semakin memburuk atau terganggu kondisi perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*. Pada perusahaan yang kondisinya buruk, banyak ditemukan indikator masalah *going concern* (Ramadhany, 2004).

Kesangsian terhadap kelangsungan hidup perusahaan merupakan indikasi terjadinya kebangkrutan. Altman (1982) dalam Setiawan (2006) memberitahukan bahwa pemakai laporan keuangan seringkali merasa pengeluaran opini *going concern* sebagai sebuah prediksi kebangkrutan. Kebangkrutan perusahaan adalah suatu proses yang dilakukan berdasarkan hukum kebangkrutan, ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau mencapai kesepakatan dengan kreditor (Watts dan Zeimberman, 1986 dalam Setiawan, 2006). Kebangkrutan dapat juga diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba (Endri, 2009). Kebangkrutan sebagai kegagalan didefinisikan dalam beberapa arti, yaitu: kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan (Adnan dan Kurniasih, 2000:137 dalam Endri, 2009).

Kegagalan dalam arti ekonomi (*economic distress*) biasanya berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak menutup biayanya sendiri, ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jatuh di bawah arus kas yang diharapkan. Bahkan kegagalan dapat juga berarti bahwa tingkat pendapatan atau biaya historis dari investasinya lebih kecil daripada biaya modal perusahaan. Kegagalan dalam arti keuangan (*Financial Distress*) berarti bahwa perusahaan mempunyai kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Sebagian *asset liability management* sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar perusahaan tidak terkena *financial distress* (Adnan dan Kurniasih, 2000:137 dalam Endri, 2009).

Berdasarkan beberapa definisi tentang *financial distress* oleh peneliti maka dapat ditarik inti pokok *financial distress*. Financial berkaitan dengan kondisi perusahaan selama satu periode, kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, mengalami laba bersih (*net profit*) negatif selama beberapa tahun, dan juga sebagai indikasi perusahaan mengarah ke kebangkrutan. Dengan demikian kondisi keuangan (*financial distress*) dapat didefinisikan sebagai suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan perusahaan selama periode tertentu yang digambarkan dengan mengalami laba bersih (*net profit*) negatif selama beberapa tahun yang akhirnya akan mengarah ke arah kebangkrutan.

Penelitian mengenai kebangkrutan perusahaan diawali dari analisis rasio keuangan, karena laporan keuangan lazimnya berisi informasi-informasi penting

mengenai kondisi dan prospek perusahaan di masa yang akan datang (Fraser, 1995 dalam Fanny dan Saputra, 2005). Beaver (1996) dalam Fanny dan Saputra (2005) telah melakukan studi tentang kerentanan perusahaan terhadap kegagalan, lima tahun sebelum perusahaan tersebut dinyatakan mengalami kesulitan keuangan. Altman (1968) juga telah melakukan studi serupa untuk menemukan suatu model prediksi kebangkrutan dalam beberapa periode sebelum kebangkrutan benar-benar terjadi.

Ross *et al.*, (2002) dalam Fitrianasari dan Januarti, (2008) kesulitan keuangan (*financial distress*) akan menyebabkan perusahaan mengalami gangguan dalam keuangan seperti, arus kas negatif, rasio keuangan yang buruk, dan gagal bayar pada perjanjian utang. Pada akhirnya, kesulitan keuangan ini akan mengarah pada *going concern* diragukan. Santosa dan Wedari (2007) menemukan bukti bahwa kondisi perusahaan yang baik maka kemungkinan kecil akan mendapat opini *going concern*.

Altman dan McGough (1974) dalam Fanny dan Saputra (2005) menyarankan penggunaan model prediksi kebangkrutan sebagai alat bantu auditor untuk memutuskan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya, karena penelitiannya menemukan bahwa tingkat prediksi kebangkrutan dengan menggunakan suatu model prediksi mencapai tingkat keakuratan 82%. Fanny dan Saputra (2005) menemukan bahwa penggunaan model prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh Altman mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit. Penelitian yang dilakukan oleh Setyarno, *et al.*, (2006)

juga berhasil membuktikan bahwa model prediksi kebangkrutan Altman berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Santosa dan Wedari (2007) melakukan penelitian yang menggunakan beberapa model prediksi kebangkrutan seperti *The Zmijeski model*, *The Springate model* dan *Altman model* menunjukkan hasil bahwa penggunaan altman berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*. Semakin baik kondisi perusahaan maka semakin kecil kemungkinan menerima opini audit *going concern* karena auditor hanya memberikan opini *going concern* perusahaan yang dikatakan bangkrut atau sulit mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terancam bangkrut berpeluang mendapatkan opini audit *going concern* dari auditor.

Sampai dengan saat ini, *Z Score* model ini masih lebih banyak digunakan oleh para peneliti, praktisi, serta para akademis di bidang akuntansi dibandingkan model prediksi kebangkrutan lainnya (Altman, 1993 dalam Fanny dan Saputra 2005). Model yang telah dikembangkan oleh Altman ini mengalami suatu revisi. Revisi yang dilakukan oleh Altman merupakan penyesuaian yang dilakukan agar model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang *go public* melainkan juga dapat diaplikasikan untuk perusahaan-perusahaan di sektor swasta.

Hal yang menarik mengenai *Z Score* adalah keandalannya sebagai alat analisis tanpa memperhatikan bagaimana ukuran perusahaan. Meskipun seandainya perusahaan sangat makmur, bila *Z Score* mulai turun dengan tajam, menunjukkan adanya indikasi bahwa perusahaan harus waspada terhadap

kebangkrutan. Atau, bila perusahaan baru saja survive, Z Score bisa digunakan untuk membantu mengevaluasi dampak yang telah diperhitungkan dari perubahan upaya-upaya manajemen perusahaan. Definisi dari kelima rasio yang dikembangkan Altman (dalam Endri, 2009) tersebut adalah sebagai berikut:

1. $\text{NWC} = \text{Net Working Capital to Total Assets}$

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membagi modal kerja bersih dengan total aktiva. Modal kerja bersih diperoleh dengan cara aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Modal kerja bersih yang negatif kemungkinan besar akan menghadapi masalah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya aktiva lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Sebaliknya, perusahaan dengan modal kerja bersih yang bernilai positif jarang sekali menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya.

2. $\text{RE} = \text{Retained Earnings to Total Assets}$

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Dengan kata lain, laba ditahan menunjukkan berapa banyak pendapatan perusahaan yang tidak dibayarkan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Laba ditahan menunjukkan klaim terhadap aktiva, bukan aktiva per ekuitas pemegang saham. Laba ditahan terjadi karena pemegang saham biasa

mengizinkan perusahaan untuk menginvestasikan kembali laba yang tidak didistribusikan sebagai dividen. Dengan demikian, laba ditahan yang dilaporkan dalam neraca bukan merupakan kas dan 'tidak tersedia' untuk pembayaran dividen atau yang lain.

3. = Earning Before Interest and Tax to Total Assets

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva perusahaan, sebelum pembayaran bunga dan pajak

4. = Market Value of Equity to Book Value of Debt

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari nilai pasar modal sendiri (saham biasa). Nilai pasar ekuitas sendiri diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar saham biasa yang beredar dengan harga pasar per lembar saham biasa. Nilai buku hutang diperoleh dengan menjumlahkan kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang

5. = Sales to Total Assets

Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan volume bisnis yang cukup dibandingkan investasi dalam total aktiva. Rasio ini mencerminkan efisiensi manajemen dalam menggunakan keseluruhan aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan mendapatkan laba.

Penelitian yang dilakukan Altman untuk perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut menunjukkan nilai tertentu. Kriteria yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan model diskriminan adalah dengan melihat *zone of ignorance* yaitu daerah nilai Z, dimana dikategorikan sebagai berikut:

TABEL 2.1
Kriteria titik cut off Model Z Score

Kriteria	Nilai Z
Tidak bangkrut/ sehat jika Z lebih dari (>)	2,99
Bangkrut jika Z kurang dari (<)	1,81
Daerah rawan bangkrut (<i>grey area</i>)	1,81-2,99

Sumber: Sawer, 2005 dalam Solikah, 2007

Berdasarkan analisis ini apabila nilai Z dari perusahaan yang diteliti lebih kecil dari 1,80 berisiko tinggi terhadap kebangkrutan, bila nilai Z berada diantara 1,81 sampai dengan 2,99 dikatakan masih memiliki resiko kebangkrutan, bila di atas nilai 2,99 atau $Z > 2,99$ aman dari kebangkrutan.

2.1.5 Debt Default

Debt Default merupakan salah satu indikasi *going concern* yang banyak digunakan oleh auditor untuk menilai kesulitan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, seperti perjanjian utang atau kegagalan utang. *Debt default* didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar utang pokok dan/ atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen dan Church, 1992). Seperti yang tercantum dalam SPAP seksi 341, indikator *going concern* yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya (*default*).

Januarti (2009) menemukan bukti bahwa *debt default* berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*. Status hutang perusahaan merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan

keuangan perusahaan dalam pemberian opini audit. Ketika jumlah hutang perusahaan sudah sangat besar, maka aliran kas perusahaan tentunya banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya, sehingga akan mengganggu kelangsungan operasi perusahaan karena kas yang tersedia untuk kegiatan operasional perusahaan semakin berkurang. Chen dan Church (1992) menyatakan bahwa kesulitan perusahaan dalam memenuhi persetujuan utang, lalai dalam pembayaran, dan pelanggaran memperjelas masalah *going concern* suatu perusahaan. Jika perusahaan mengalami status default, maka semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini *going concern*.

Auditor dalam memberikan opini audit *going concern* akan mempertimbangkan status *default* seperti yang tercantum dalam SPAP sekai 341. Hal ini dibuktikan pada penelitian Ramadhany (2004) dan Carcello dan Neal (2000) dalam Setyarno, *et al.*, (2006), serta Praptitorini dan Januarti (2007) yang menunjukkan bahwa status *debt default* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sebagian besar perusahaan yang mendapat status *debt default* adalah perusahaan yang menerima opini audit *going concern*. Dengan demikian, jika perusahaan tidak mampu melunasi semua utang-utangnya maka kelangsungan hidup perusahaan diragukan sehingga perusahaan cenderung akan menerima opini audit *going concern*.

2.1.6 Opini Audit Tahun Sebelumnya

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima *auditee* pada tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum tahun penelitian. Opini audit tahun

sebelumnya ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu *auditee* dengan opini *going concern* (*Going concern Audit Opinion*) dan tanpa opini *going concern* (*Non Going concern Audit Opinion*).

Mutchler (1984) dalam Ramadhany (2004) melakukan wawancara dengan praktisi auditor yang menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun berjalan. Mutchler (1985) dalam Sholikah (2007) menguji pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap prediksi opini audit *going concern*, yaitu tipe opini audit yang telah diterima perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa model *discriminant analysis* yang memasukkan tipe opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi prediksi keseluruhan yang paling tinggi sebesar 89,9 persen dibanding model yang lain.

Opini audit tahun sebelumnya akan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. *Auditee* yang menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya akan dianggap memiliki masalah kelangsungan hidupnya, sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan menerima kembali opini audit *going concern* pada tahun berjalan. Venuty (2007) menyatakan bahwa penyebab masalah tersebut adalah adanya hipotesis *self-fulfilling prophecy* yang menyatakan bahwa apabila auditor memberikan opini *going concern*, maka perusahaan akan menjadi cepat bangkrut karena banyak investor yang akan membatalkan investasinya atau kreditor yang menarik dananya. Perusahaan yang menerima opini audit *going concern* akan mengalami kesulitan keuangan dalam

satu tahun kedepan sehingga akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan.

Hal ini dibuktikan dengan penelitian oleh Rahmadhany (2004); Carcello dan Neal (2000) dalam Setyarno dan Januarti (2006); Setyarno, *et al.*, (2006); Praptitorini dan Januarti (2007) serta Januarti (2009) memperkuat bukti mengenai opini audit *going concern* yang diterima tahun sebelumnya dengan opini audit *going concern* tahun berjalan. Ada hubungan positif yang signifikan antara opini audit *going concern* tahun sebelumnya dengan opini audit *going concern* tahun berjalan. Apabila pada tahun sebelumnya auditor telah menerbitkan opini audit *going concern*, maka akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan kembali opini audit *going concern* pada tahun berikutnya.

2.1.7 Kualitas audit

Kualitas auditor dapat diukur dengan kualitas audit (hasil pekerjaan yang berkualitas). Seorang auditor yang berkualitas akan mampu menghasilkan informasi yang *reliable* dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor untuk dapat menemukan dan melaporkan penyelewengan dalam sistem akuntansi klien (Christina, 2003 dalam Santosa dan Wedari, 2007). Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kualitas hasil pekerjaan auditor adalah melalui kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Menurut Bedard dan Michelene (1993) dalam Wibowo dan Rossieta (2009) ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi sebuah keputusan secara umum, yaitu *outcome oriented* dan *process oriented*.

Untuk pendekatan yang berorientasi proses, Li Dang (2004) juga O'Keefe *et al.* (1994) dalam Wibowo dan Rossieta (2009) berpendapat bahwa dalam konteks Amerika Serikat, kualitas keputusan diukur dengan: (i) tingkat kepatuhan auditor terhadap *General Acceptance on Auditing Standards (GAAS)*; (ii) tingkat spesialisasi auditor dalam industri tertentu. Bagi pendekatan yang berorientasi hasil, Francis (2004) mengukur kualitas audit melalui hasil audit. Ada dua hasil audit yang dapat diobservasi yaitu: (i) laporan audit; dan (ii) laporan keuangan.

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu self-interest maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal dan agen sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi. Auditor yang memiliki kualitas audit yang baik cenderung akan memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan yang mengalami masalah mengenai *going concern* (Santosa dan Wedari, 2007). Mutcler *et. al.*, (1997) dalam Santosa dan Wedari, (2007) menemukan bukti bahwa auditor berskala besar yang tergabung pada big 6 cenderung memberikan opini *going concern* dibandingkan auditor no big 6.

Pengukuran kualitas audit tetap masih merupakan sesuatu yang tidak jelas, tetapi pemakai laporan keuangan mengkaitkan dengan reputasi auditor (Teoh and Wang, 1993 dalam Januarti, 2009). Selama ini, penelitian mengenai kualitas auditor banyak dikaitkan dengan ukuran KAP dan reputasi KAP. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Craswell *et al.*, (1995) dalam Prapitorini dan Januarti (2007), reputasi auditor kurang bernilai ketika dalam

suatu industri juga terdapat auditor spesialis. Karena tingginya kegagalan audit yang terungkap akhir-akhir ini menyebabkan kualitas audit yang diukur dengan reputasi auditor diragukan keandalannya. Karakteristik industry mungkin berpengaruh pada suatu perubahan lebih besar dibandingkan pada perusahaan lain. Auditor yang memiliki spesialisasi pada industri tertentu pasti akan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi lingkungan industri tersebut (Craswell *et al.*, 1995 dalam Januarti, 2009)

Li Dang *et al.*, (2004) dan O'Keefe (1994) dalam Prapitorini dan Januarti (2007) juga berpendapat bahwa *auditor industry specialization* berhubungan positif dengan kualitas audit diukur dengan penilaian kepatuhan auditor terhadap *General Acceptance on Auditing Standards (GAAS)*. Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang risiko audit khusus yang mewakili industri tersebut. Auditor yang spesialis dalam industry tertentu akan mampu mendeteksi dan menemukan informasi yang berpengaruh terhadap *going concern* perusahaan karena lebih paham dalam bidang industry tersebut. Sehingga perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis cenderung akan menerima opini audit *going concern* jika mengalami masalah yang mengganggu kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

2.1.8 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam publikasi yang pertamanya mendefinisikan *Good Corporate Governance* dengan mempergunakan definisi Cadbury Committee, yaitu:

"seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan."

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Dengan menerapkan *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi dorongan manajer untuk melakukan tindakan manipulasi data keuangan, sehingga kinerja yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan bersangkutan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan (Jensen, 1993 dalam Ujiyantho dan Pramuka 2007).

Good corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat meminimalkan masalah agensi antara *principal* dan agen dengan memberikan keyakinan terhadap pihak *principal* terhadap kinerja manajemen. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Selain itu juga berkaitan dengan pertanggungjawaban dana (kapital) yang telah ditanamkan oleh investor, dan bagaimana para investor mengontrol para manajer perusahaan dapat terus hidup (*going concern*) (Shleifer dan Vishny, 1997 dalam Herawaty 2008). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau

menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) dan juga menjaga kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) mengemukakan manajemen perlu memperhatikan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagaimana yang diuraikan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) antara lain transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) agar perusahaan dapat terus menjaga kelangsungan hidupnya. Komponen-komponen GCG tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan (Kaihatu, 2006). Selain itu *good corporate governance* juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan akan terhindar dari kebangkrutan dan dapat terus menjaga kelangsungan hidupnya (*going concern*).

Untuk memastikan *corporate governance* dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau arah kebijakan yang ditetapkan maka diperlukan suatu mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* dapat diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak pengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme diarahkan untuk menjamin dan mengawasi jalannya sistem *governance* dalam suatu perusahaan (Syakhoroza,

2002a, 2002b; *World Bank*, 1999; Kim dan Nofsinger, 2004 dalam Petronila, 2007).

Syakhoraza, (2005) dalam Petronila, (2007) dalam bidang pengendalian, membedakan *corporate governance mechanism* menjadi dua kelompok yaitu *internal corporate governance mechanism* dan *external corporate governance mechanism*.

- a. mekanisme *Corporate Governance* yang bersifat internal merupakan interaksi antara pihak-pihak pengambil keputusan dalam perusahaan yang mencakup Dewan Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commisioner*), *Executive Management* yang di dalamnya termasuk Komite Audit (*Audit Committee*), dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. mekanisme *Corporate Governance* yang bersifat eksternal merupakan interaksi antara pihak-pihak yang mengawasi kinerja perusahaan, antara lain Stakeholders (karyawan, konsumen, pemasok, kreditur, masyarakat) dan reputational agents (akuntan, pengacara, badan pemeringkat kredit, manajer investasi).

Indikator mekanisme *internal corporate governance* terdiri dari jumlah dewan direktur, proporsi dewan komisaris independen, dan *debt to equity*. Sedangkan indikator mekanisme eksternal *corporate governance* terdiri dari *institutional ownership* (S. Beiner *et al*, 2003 dalam Wulandari, 2006).

2.1.8.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Beiner *et al*, 2003 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Menurut Wening (2007) dalam Sabrinna (2010), kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

Short dan Keasy (1999), Morek *et al.*, (1998), Mc Connell dan Servaes (1990, 1995) serta Kole (1995) dalam Janurati (2009) menyatakan semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan, dengan demikian diharapkan akan ada monitoring atas keputusan manajemen. Adanya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, akan mendorong kinerja manajemen agar lebih baik atau sesuai yang diharapkan investor, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Dengan demikian perusahaan diharapkan dapat menjaga kelangsunga hidup entitas tanpa henti.

Bathala *et al.*, (1994) dalam Sabrinna (2010) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol *agency cost*. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga

akan meningkat. Kinerja meningkat ditandai juga dengan harapan perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

2.1.8.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005). Kepemilikan manajerial meliputi pemegang saham yang memiliki kedudukan dalam perusahaan sebagai kreditur maupun sebagai Dewan Komisaris. Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki manajer dan direktur perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (*congruance*) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faizal, 2004). Herawaty (2008) juga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai mekanisme *corporate governance* sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam memanipulasi laba. Dengan demikian, kepemilikan manajerial sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* merupakan sarana *monitoring* yang efektif yang dapat membawa pada kualitas pelaporan yang lebih tinggi, sehingga opini audit yang diterima atas laporan keuangan perusahaan cenderung merupakan opini yang bersih (*clean opinion*).

Parker *et al.* (2005) dalam Petronila (2007) menunjukkan bahwa hubungan antara kepemilikan anggota dewan dengan opini *going concern* berbanding terbalik. Adanya prosentase kepemilikan anggota dewan dalam perusahaan semakin besar maka anggota dewan tersebut akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan karena merasa memiliki perusahaan sehingga berusaha untuk tetap dapat mempertahankan eksistensi perusahaan dan berkembang melalui peningkatan pengendalian (Petronila, 2007). Namun, kekuasaan yang dipegang oleh manajer dengan kepemilikan sahamnya yang besar juga dapat membawa dampak negatif pada pemegang saham eksternal, dimana pemegang saham eksternal tidak dapat mengendalikan tindakan manajemen (Linoputri, 2010).

2.1.8.3 Komisaris Independen

Berdasarkan *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI), dewan komisaris merupakan inti *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Beberapa tugas dewan komisaris untuk mencegah munculnya masalah *going concern* meliputi: memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset, memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. Namun, di dalam prakteknya Dewan komisaris tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga diperlukan dewan komisaris yang benar-benar independen.

Proporsi komisaris independen dihitung dengan persentase komisaris independen dalam Dewan Komisaris. Komisaris independen didefinisikan seperti definisi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), yaitu:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Proporsi komisaris independen dihitung dengan persentase komisaris independen dalam Dewan Komisaris.”

Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan Komisaris Independen adalah sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan berbagai kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya (Task force Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Diharapkan dengan adanya komisaris independen dapat mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris.

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang *listed* di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan

controlling shareholders). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 mengemukakan beberapa kriteria lainnya tentang Komisaris Independen, yaitu:

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keberadaan komisaris independen merupakan salah satu ciri khas dalam *Good Corporate Governance* (Petronila, 2007). Komisaris independen diharapkan mampu memberikan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip utama untuk menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang sering terabaikan seperti pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya (Linoputri, 2010). Petronila (2007) mengungkapkan keberadaan komisaris independen dapat menyeimbangkan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder*, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi auditor dalam pemberian opini audit *going concern*.

2.1.8.4 Komite Audit

Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Komite tersebut ditujukan untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan *corporate governance* (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP-339/BEJ/2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek hanya komite audit.

Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris dapat dibantu oleh komite audit. Sesuai dengan Keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep.Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa:

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan”.

Sesuai Surat Edaran BAPEPAM No.SE-03/TM/2000 menyatakan bahwa komite audit pada perusahaan publik Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota yang diketahui oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* tentang pembentukan komite audit yang efektif (2002) menyatakan bahwa “Komite Audit memiliki peranan yang penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi, berbagai ketentuan dan peraturan mengenai Komite Audit telah dibuat diantaranya:

- a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit;

- b. Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit;
- c. KEP-339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit;
- d. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit; dan
- e. KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit;”

Komite audit berfungsi untuk meningkatkan fungsi audit internal dan eksternal serta meningkatkan kualitas laporan keuangan (Linoputri, 2010). Carcello dan Neal, (2000) dalam Ramadhany, (2004) menyatakan bahwa keberadaan *inside* dan *grey director* (komisaris/direktur yang berasal dari manajemen) dapat mengurangi kemungkinan penerimaan opini audit *going concern* pada komite audit perusahaan yang mengalami *financial distress*. Penelitian Salterio (2001) dan Abbot (2004) dalam Masyitoh dan Adhariani, (2010) mendukung bahwa komite audit dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam hubungannya karakteristik komite audit dan indikator kualitas dalam laporan keuangan. Dengan adanya komite audit maka akan ada pengawasan yang lebih kuat agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian tentang opini *going concern* yang dilakukan di Indonesia antara lain dilakukan oleh:

1. Ramadhany (2004), meneliti pengaruh variabel keberadaan komite audit, *default* hutang, kondisi keuangan, opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan dan skala auditor terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur

yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Penelitian tersebut memberikan bukti empiris bahwa variabel *default* hutang, kondisi keuangan (*financial distress*), dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

2. Fanny dan saputra (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel model prediksi kebangkrutan yaitu Altman dan revised altman model, model Springate dan model Zmijewski, selain itu juga menggunakan variabel pertumbuhan perusahaan serta Reputasi Kantor Akuntan Publik. Penelitiannya menemukan bukti bahwa model prediksi oleh Altman merupakan model prediksi terbaik di antara kedua model prediksi lainnya, selanjutnya diikuti oleh model Springate. Sedangkan penggunaan model Zmijewski memberikan performance terburuk dalam prediksi kebangkrutan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberian opini audit *going concern* tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan dan Reputasi Kantor Akuntan Publik.
3. Penelitian Setyarno *et al.*, (2006) menggunakan 4 variabel, yaitu 2 variabel keuangan (kondisi keuangan perusahaan dan pertumbuhan perusahaan) serta non keuangan (kualitas audit dan opini audit tahun sebelumnya). Dengan menggunakan alat analisis Regresi Logistik, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa variabel kondisi keuangan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh

signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*, sedangkan variabel kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

4. Santosa dan Wedari (2007) menyimpulkan bahwa pada penerimaan opini audit dapat ditunjukkan melalui observasi kondisi internal perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan. Hasilnya, kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak mempengaruhi opini *going concern*, sedangkan ukuran perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini *going concern*. Namun, opini *going concern* pada tahun sebelumnya memiliki pengaruh yang positif terhadap opini *going concern*.
5. Rahayu (2007) menyatakan bahwa penilaian opini *going concern* tidak hanya berdasarkan informasi-informasi non keuangan, tetapi juga dapat dilihat dari sisi keuangan. Penelitian Rahayu (2007), menilai opini *going concern* dengan studi yang berdasarkan informasi non keuangan (afiliasi komisaris independen dengan komite audit, opini audit tahun sebelumnya, dan reputasi auditor), dan informasi keuangan yang diprosikan dengan rasio keuangan yaitu, likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas. Ternyata variabel-variabel keuangan tersebut bukanlah ukuran yang efektif untuk memprediksi pemberian opini

going concern. Hanya opini tahun sebelumnya dan kualitas auditor yang berpengaruh signifikan terhadap opini *going concern*.

6. Praptitorini dan Januarti (2007) menggunakan variabel yang sedikit berbeda yaitu dengan menggunakan variable *opinion shopping* dan kualitas audit diproksikan dengan *auditor industry specialization*, yang pada penelitian sebelumnya diproksikan dengan skala auditor. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini *going concern*. Sementara itu, *debt default* berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Perusahaan di Indonesia cenderung menerima opini non *going concern* ketika tidak melakukan pergantian auditor, menandakan kurangnya tingkat independensi auditor di Indonesia.
7. Januarti (2009) melakukan penelitian dengan menggunakan faktor perusahaan, kualitas auditor serta kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Faktor perusahaan terdiri dari *financial distress*, *debt default*, ukuran perusahaan, *audit lag* opini sebelumnya, *audit client tenure* dan *opinion shopping*. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kualitas audit, *debt default*, opini sebelumnya, ukuran perusahaan, dan pergantian auditor (*audit client tenure*) *opinion shopping* berpengaruh signifikan terhadap opini *going concern*, tetapi *financial distress*, *audit lag*, *opinion shopping*,

kepemilikan manajerial dan institusional tidak berpengaruh terhadap opini *going concern*.

8. Petronila (2007) yang memfokuskan pada pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap penerimaan opini *going concern*. Penelitian ini menggunakan variabel perubahan dewan komisaris, perubahan dewan direksi, kepemilikan anggota dewan, kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dan resiko saham. Dari penelitian ini didapat bukti bahwa ada empat variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit *going concern* yaitu perubahan dewan komisaris, perubahan dewan direksi, kepemilikan anggota dewan serta resiko saham. Sedangkan variable kualitas KAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit *going concern*.
9. Ballesta dan Garcia-Meca (2005) telah menjelaskan mengenai peran *corporate governance* terhadap audit eksternal, dengan memfokuskan pada hubungan antara mekanisme *corporate governance* dengan penerimaan opini audit wajar dengan pengecualian. Opini *going concern* pada dasarnya terdapat pada opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas dan wajar dengan pengecualian. Penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu kepemilikan terpusat, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga serta ukuran dewan komisaris. Di Spanyol hasil penelitiannya di perusahaan-perusahaan non keuangan yang go public di Spanyol menunjukkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang lebih besar cenderung tidak menerima

opini yang qualified (wajar dengan pengecualian). Namun, keberadaan anggota keluarga justru berpengaruh positif terhadap penerimaan opini wajar dengan pengecualian. Selain itu, perusahaan yang menerima opini wajar dengan pengecualian memiliki rasio profitabilitas dan likuiditas yang lebih rendah.

Berdasarkan uraian di atas penelitian-penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* dapat diringkas dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perbandingan penelitian-penelitian terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Variabel		Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Dependen	Independen		
1.	Alexander Ramadhany (2005)	Penerimaan opini audit <i>going concern</i>	-komite audit -default utang - kondisi keuangan - opini audit tahun sebelumnya -ukuran perusahaan -skala auditor	Regresi Logistik	Kondisi keuangan, Default utang, dan opini audit sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> Sedangkan komite audit, ukuran perusahaan, dan skala auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> .

2.	Margaretta Fanny dan Sylvia Saputra (2005)	Pemberian opini audit <i>going concern</i>	-kondisi keuangan perusahaan -pertumbuhan perusahaan -reputasi auditor	Regresi Logistik	Kondisi keuangan dengan menggunakan Revised Altman berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> sedangkan pertumbuhan perusahaan dan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>
3.	Setyarno, <i>et al</i> (2006)	Penerimaan opini audit <i>going concern</i>	-kondisi keuangan perusahaan -pertumbuhan penjualan -kualitas audit -opini audit tahun sebelumnya	Regresi Logistik	Kondisi keuangan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> , sedangkan kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>
4.	Mirna Dyah Praptitorini dan Indira Januarti (2007)	Penerimaan opini audit <i>going concern</i>	- <i>debt default</i> - kualitas audit - <i>opinion shopping</i>	Regresi Logistik	<i>Debt default</i> dan <i>opinion shopping</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> , sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>

5.	Puji Rahayu (2007)	Assesing opini audit <i>going concern</i>	-rasio likuiditas -rasio profitabilitas -rasio solvabilitas -opini audit tahun sebelumnya -reputasi auditor -afiliasi	Regresi Logistik	Reputasi auditor dan Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> , sedangkan Rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan afiliasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>
6.	Santosa dan Wedari (2007)	Penerimaan opini audit <i>going concern</i>	- kondisi keuangan -pertumbuhan perusahaan - kualitas audit -opini audit tahun sebelumnya -ukuran perusahaan	Regresi Logistik	Kondisi keuangan, Opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> sedangkan pertumbuhan perusahaan dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>
7.	Januarti (2009)	Penerimaan opini audit <i>going concern</i>	<i>financial distress, debt default</i> , ukuran perusahaan, <i>audit lag</i> , opini sebelumnya, pergantian auditor, kualitas audit, <i>opinion shopping</i> , kepemilikan manajerial dan institusional	Regresi Logistik	<i>Debt default</i> , ukuran perusahaan, pergantian auditor, opini sebelumnya, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap <i>opini going concern</i> . <i>Financial distress, audit lag, opinion shopping</i> , kepemilikan manajerial dan institusional tidak berpengaruh terhadap opini <i>going concern</i>

8.	Ballesta dan Garcia-Meca (2005)	penerimaan opini audit yang <i>qualified</i>	Kepemilikan terpusat, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, ukuran dewan komisaris	Regresi Logistik	Kepemilikan terpusat dan ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang besar cenderung menerima opini <i>unqualified</i> . Keberadaan anggota keluarga dalam dewan meningkatkan kemungkinan penerimaan opini audit yang <i>qualified</i> .
9.	Petronila (2007)	Pemberian opini audit <i>going concern</i>	Perubahan dewan komisaris, perubahan dewan direksi, kepemilikan anggota dewan, kualitas kantor akuntan publik (KAP), risiko saham	Regresi <i>binary logistic</i>	Perubahan dewan komisaris, perubahan dewan direksi, kepemilikan anggota dewan berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini audit <i>going concern</i> , kualitas KAP tidak memiliki pengaruh terhadap pemberian opini audit <i>going concern</i>

Sumber: Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti mencoba kembali meneliti tentang pengaruh faktor perusahaan terhadap penerimaan opini *going concern*. Penelitian ini menggunakan faktor perusahaan seperti pada penelitian Januarti (2009) yaitu *financial distress*, *debt default* dan opini audit sebelumnya karena faktor tersebut dinilai mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan opini audit *going*

concern, tetapi masih banyak hasil penelitian yang saling bertentangan. *Financial distress* tetap menggunakan revised altman model karena dari hasil penelitian Fanny dan Saputra, (2005) menunjukkan model altman terbaik dibandingkan model lainnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel kualitas audit yang diproksikan dengan *auditor industry specialization*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel mekanisme *good corporate governance* yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit. *Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat meminimalkan masalah agensi antara *principal* dan agen dengan memberikan keyakinan terhadap pihak *principal* terhadap kinerja manajemen serta diharapkan dapat mengatasi masalah *going concern*. Variabel dalam penelitian diukur menggunakan proporsi masing-masing variabel yaitu proporsi kepemilikan institusional, proporsi kepemilikan manajerial, dan proporsi komisaris independen. Sedangkan untuk komite audit digunakan jumlah komite audit dalam perusahaan, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang diukur dengan ada atau tidaknya komite audit dalam perusahaan.

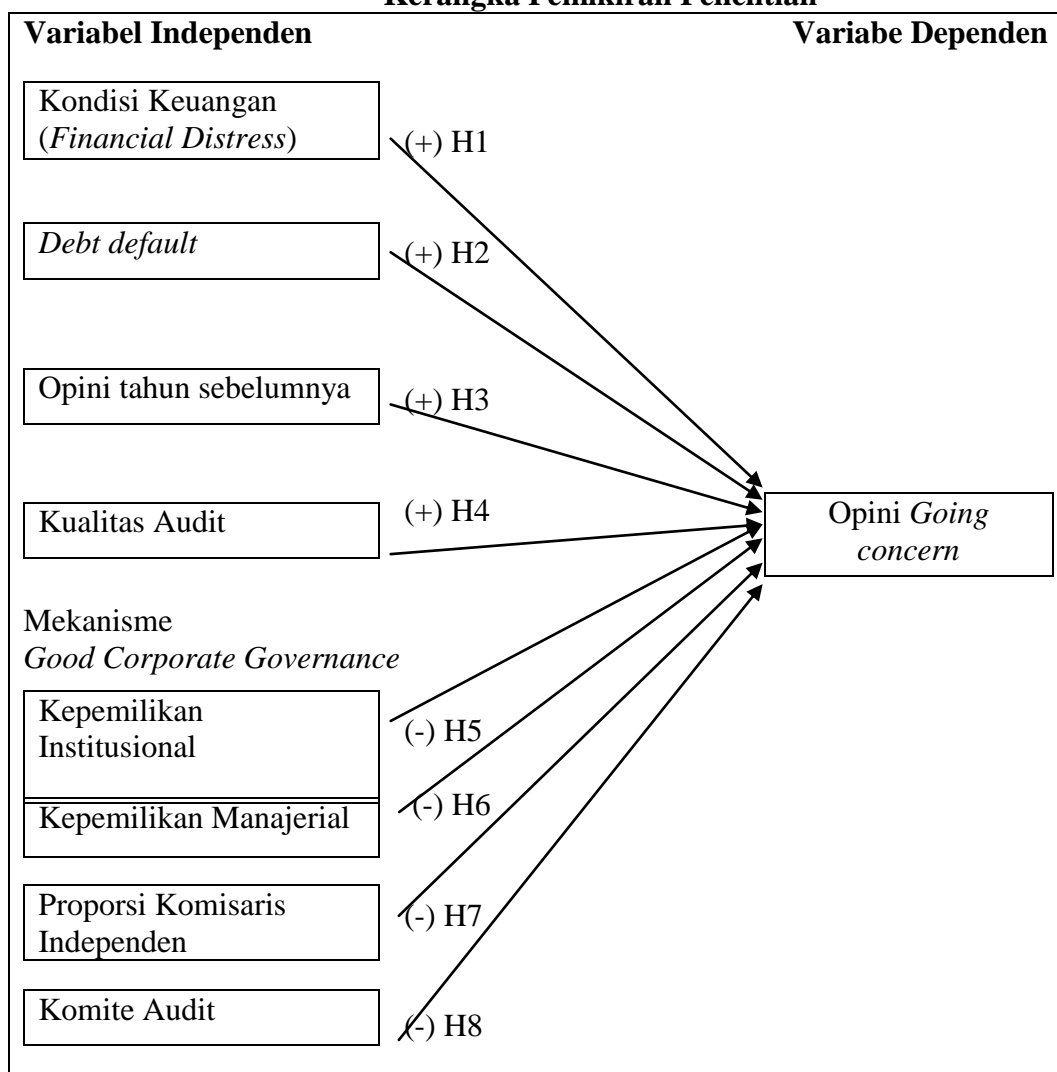
2.3 Kerangka Pemikiran

Seorang auditor harus memperhatikan faktor perusahaan seperti *financial distress*, *debt default* dan opini audit tahun sebelumnya sebagai dasar dalam memberikan opini audit *going concern*. Auditor yang spesialis akan memiliki

pemahaman yang lebih mengenai bisnis klien sehingga akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan menggambarkan keadaan sebenarnya.

Pengaruh faktor perusahaan, kualitas audit, serta mekanisme *good corporate governance* terhadap penerimaan opini audit *going concern* dapat dijelaskan dalam suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran tersebut disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kondisi Keuangan (*Financial Distress*) dan Opini Audit *Going concern*

Penelitian mengenai kebangkrutan perusahaan diawali dari analisis rasio keuangan, karena laporan keuangan lazimnya berisi informasi-informasi penting mengenai kondisi dan prospek perusahaan di masa yang akan datang (Fraser, 1995 dalam Fanny dan Saputra, 2005). Sebagian besar penelitian terdahulu telah menggunakan rasio keuangan untuk mengidentifikasi masalah *going concern* (Koh dan Tan, 1999; Chen dan Church, 1992; Mutcler, 1985 dalam Januarti, 2009). Altman (1968) telah melakukan studi untuk menemukan suatu model prediksi kebangkrutan dalam beberapa periode sebelum kebangkrutan benar-benar terjadi. Model prediksi yang digunakan didasarkan pada kondisi keuangan (*financial distress*) perusahaan.

Altman dan McGough (1974) dalam Fanny dan Saputra (2005) menyarankan penggunaan model prediksi kebangkrutan sebagai alat bantu auditor. Hal ini dikarenakan tingkat prediksi kebangkrutan dengan menggunakan suatu model prediksi mencapai tingkat keakuratan 82% untuk memutuskan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Fanny dan Saputra (2005) penggunaan model prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh Altman mempengaruhi ketepatan dalam pemberian opini audit.

Santosa dan Wedari (2007) yang menggunakan beberapa model prediksi kebangkrutan seperti *The Zmijeski model*, *The Springate model* dan *Altman model* menemukan hasil yang sama dengan penelitian Setyarno,dkk., (2006) bahwa

model prediksi kebangkrutan Altman berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Mc Keown (1991) dalam Januarti (2009) mengemukakan bahwa perusahaan yang tidak pernah mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), auditor tidak pernah memberikan opini audit *going concern*. Sebaliknya, semakin memburuk atau terganggu kondisi perusahaan yang ditandai dengan mengalami *financial distress* maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terancam bangkrut atau mengalami *financial distress* berpeluang mendapatkan opini audit *going concern* dari auditor.

Ross *et al.*, (2002) dalam Fitrianasari dan Januarti, (2008) menyatakan bahwa kesulitan keuangan (*financial distress*) akan menyebabkan perusahaan mengalami gangguan dalam keuangan seperti arus kas negatif, rasio keuangan yang buruk, dan gagal bayar pada perjanjian utang. Pada akhirnya, kesulitan keuangan ini akan mengarah pada *going concern* diragukan. Pada perusahaan yang kondisinya buruk, banyak ditemukan indikator masalah *going concern* (Ramadhany, 2004). Perusahaan yang kondisi keuangan buruk merupakan perusahaan yang mengalami kesulitan dalam keuangan dan operasinya yang mengindikasikan perusahaan akan bangkrut.

Financial distress berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Perusahaan yang mengalami *financial distress* kemungkinan besar akan mendapat opini audit *going concern* karena perusahaan tersebut mengindikasikan kelangsungan hidup yang diragukan dan terancam bangkrut. Hal ini sejalan dengan penelitian Santosa dan Wedari (2007) yang menemukan bukti bahwa

kondisi perusahaan yang baik atau tidak mengalami *financial distress* maka kemungkinan kecil akan mendapat opini audit *going concern*.

Financial distress merupakan faktor perusahaan yang banyak dipakai untuk memprediksi kelangsungan hidup perusahaan dan juga kebangkrutan yang akan terjadi. Hofer (1980:20) dan Whitaker (1999:124) dalam (Endri, 2009) mengumpamakan kondisi *financial distress* sebagai suatu kondisi dari perusahaan yang mengalami laba bersih (*net profit*) negatif selama beberapa tahun. Jika perusahaan mengalami *financial distress* menandakan kelangsungan hidup perusahaan diragukan sehingga besar kemungkinan menerima opini audit *going concern*.

H1 : Perusahaan yang mengalami *financial distress* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini *going concern*

2.4.2 Debt Default dan Opini Audit *Going concern*

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang dan atau bunga merupakan indikator *going concern* yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan (Januarti, 2009). Auditor dalam memberikan opini audit *going concern* akan mempertimbangkan status *default*. Jika perusahaan mengalami status *default*, maka semakin besar kemungkinan menerima opini *going concern*. Hal ini dibuktikan pada penelitian Ramadhany (2004); Carcello dan Neal (2000) dalam Setyarno,dkk., (2006), serta Praptitorini dan Januarti (2007) yang menunjukkan bahwa status *debt default* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sebagian besar perusahaan

yang mendapat status *debt default* adalah perusahaan yang menerima opini audit *going concern*.

Status *default* dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan opini *going concern* (Januarti, 2009). Chen dan Church (1992) menemukan hubungan yang kuat antara status *default* dengan opini *going concern* dengan menambahkan variabel *default* hutang pada model prediksi *going concern* yang sebelumnya hanya menggunakan rasio-rasio keuangan saja. Hasil penelitiannya menunjukkan kesulitan perusahaan dalam memenuhi persetujuan utang, lalai dalam pembayaran, dan pelanggaran memperjelas masalah *going concern* suatu perusahaan. Perusahaan yang mendapat status *default* mengindikasikan kelangsungan perusahaan diragukan, sehingga kemungkinan menerima opini audit *going concern*.

Status hutang perusahaan merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan dalam pemberian opini audit. Ketika jumlah hutang perusahaan sudah sangat besar, maka aliran kas perusahaan tentunya banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya, sehingga mengganggu kelangsungan operasi perusahaan karena kas yang tersedia untuk kegiatan operasional perusahaan semakin berkurang. Apabila hutang ini tidak mampu dilunasi, maka kreditor akan memberikan status *default*. Perusahaan akan sulit menjaga kelangsungan hidupnya jika kondisi ini terjadi secara terus menerus dan tidak dapat diatasi. Penelitian Januarti (2009) menemukan bukti bahwa *debt default* berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*. Perusahaan yang tidak mampu membayar utang pokok atau bunganya pada saat jatuh tempo (*debt*

default) maka kemungkinan besar perusahaan akan menerima opini audit *going concern*.

H2: *Debt default* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2.4.3 Opini Audit Tahun sebelumnya dan opini audit *going concern*

Auditee yang menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya akan dianggap memiliki masalah kelangsungan hidupnya, sehingga semakin besar kemungkinan bagi auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern* pada tahun berjalan (Januarti, 2009). Venuty (2007) menyatakan bahwa penyebab masalah tersebut adalah adanya hipotesis *self-fulfilling prophecy* yang menyatakan bahwa apabila auditor memberikan opini *going concern*, maka perusahaan akan menjadi cepat bangkrut. Penerimaan opini audit *going concern* tahun sebelumnya mengakibatkan banyak investor yang akan membatalkan investasinya atau kreditor yang menarik dananya sehingga timbul keraguan terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Mutchler (1984) dalam Ramadhany (2004) menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun berjalan. Mutchler (1985) dalam Sholikhah (2007) menguji pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap prediksi opini audit *going concern*, yaitu tipe opini audit yang telah diterima perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa model *discriminant analysis* yang memasukkan tipe opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi prediksi keseluruhan yang paling tinggi sebesar 89,9 persen dibanding model yang lain.

Penelitian oleh Rahmadhany (2004); Setyarno, *et al.*, (2007); Prapitorini dan Januarti (2007); serta Januarti (2009) memperkuat bukti mengenai pengaruh opini audit *going concern* yang diterima tahun sebelumnya dengan penerimaan opini audit *going concern* tahun berjalan. Ada hubungan positif yang signifikan antara opini audit *going concern* tahun sebelumnya dengan opini audit *going concern* tahun berjalan. Apabila pada tahun sebelumnya perusahaan menerima opini audit *going concern*, maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan menerima kembali opini audit *going concern* pada tahun berikutnya. Perusahaan yang menerima opini *going concern* tahun sebelumnya mengindikasikan adanya keraguan tentang kelangsungan hidup perusahaan sampai periode berikutnya. Disisi lain, dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang semula akan bangkrut untuk dapat berkembang dan terus hidup. Dengan demikian, opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

H3: Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2.4.4 Kualitas Audit dan opini audit *going concern*

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu *self-interest* maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal dan agen sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang mempunyai kualitas tinggi yang akan berguna untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan (Santosa dan Wedari, 2007). Investor akan lebih

cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi dibandingkan dengan kualitas audit yang rendah (Prapitorini dan Januarti, 2007).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Auditor yang memiliki kualitas audit yang baik cenderung akan memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan yang mengalami masalah mengenai *going concern* (Santosa dan Wedari, 2007). Auditor tersebut akan menjaga independensi dan reputasinya dengan mengungkapkan semua informasi perusahaan baik yang sudah terjadi dan akan terjadi (*going concern*).

Pengukuran kualitas audit masih tetap merupakan sesuatu yang tidak jelas, tetapi pemakai laporan keuangan biasanya mengaitkan dengan reputasi auditor (Teoh and Wong 1993 dalam Januarti, 2009). Penelitian De Angelo (1981) dalam Setyarno *et al.*, (2006) menyatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi audit dibandingkan pada auditor skala kecil. Mutcler *et al.* (1997) dalam Santosa dan Wedari, (2007) menemukan bukti bahwa auditor berskala besar yang tergabung pada big 6 cenderung memberikan opini *going concern* dibandingkan auditor no big 6. Auditor yang memiliki reputasi baik cenderung untuk mempertahankan kualitas auditnya agar reputasinya tetap terjaga dan tidak kehilangan klien (Januarti, 2009).

Tingginya kegagalan audit yang terungkap akhir-akhir ini menyebabkan proksi kualitas audit (reputasi auditor dan ukuran auditor) diragukan keandalannya. Menurut Craswell *et al.*, (1995) dalam Januarti (2009) karakteristik

industri mungkin berpengaruh pada suatu perubahan lebih besar dibandingkan pada perusahaan lain. Auditor yang memiliki spesialisasi pada industri tertentu akan mampu mendeteksi dan mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan kelangsungan hidup perusahaan karena memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan dengan auditor yang tidak spesialis.

Li Dang *et al*, (2004), O'Keefe (1994) dalam Prapitorini dan Januarti (2007) juga berpendapat bahwa *auditor industry specialization* berhubungan positif dengan kualitas audit diukur dengan penilaian kepatuhan auditor terhadap *General Acceptance on Auditing Standards (GAAS)*. Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang risiko audit khusus yang mewakili industri tersebut. Prapitorini dan Januarti (2007) mengemukakan *auditor industry specialization* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Penelitian Januarti (2009) juga menemukan bukti bahwa semakin spesialis auditor dalam suatu industri, maka akan semakin baik pengetahuannya tentang perusahaan yang diaudit sehingga akan lebih baik dalam memberikan opini. Dengan demikian, semakin spesialis auditor dalam suatu industri maka kemungkinan besar perusahaan yang mengalami masalah *going concern* akan menerima opini audit *going concern*.

H4 : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2.4.5 Kepemilikan Institusional dan opini audit *going concern*

Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan pengelola perusahaan pada khususnya. Investor

institusional akan memantau secara professional perkembangan investasi yang ditanamkan pada perusahaan dan memiliki tingkat pengendalian yang tinggi terhadap tindakan manajemen (Sabrinna, 2010). Hal ini memperkecil potensi manajemen untuk melakukan kecurangan, dengan demikian maka dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan kepentingan *stakeholders* lainnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya peningkatan kinerja maka perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup (*going concern*) dan berkembang.

Short dan Keasy (1999), Morek *et al.*, (1998), Mc Connell dan Servaes (1990, 1995) serta Kole (1995) dalam Januarti (2009) menyatakan semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan, karena adanya monitoring atas keputusan manajemen. Adanya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, akan mendorong kinerja manajemen agar lebih baik atau sesuai yang diharapkan investor. Bathala *et al.*, (1994) dalam Sabrinna (2010) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol *agency cost*. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat.

Menurut Wening (2007) dalam Sabrinna (2010), kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Kepemilikan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga mengurangi terjadinya resiko kesulitan keuangan. Mc Keown (1991) dalam Januarti (2009) mengemukakan bahwa perusahaan yang tidak pernah mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), auditor tidak pernah memberikan opini audit *going concern*.

Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan fungsi monitoring atas keputusan manajemen, sehingga mengurangi potensi kebangkrutan (Januarti, 2009). Standar Professional Akuntan Publik (SPAP, 2001) memberikan pedoman bahwa jika suatu kelangsungan hidup entitas diragukan dan mengarah ke kebangkrutan maka auditor harus mengungkapkan informasi tersebut dalam opininya. Auditor dapat memberikan opini audit *going concern*. Dengan demikian semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka semakin kecil kemungkinan menerima opini audit *going concern*.

H5 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2.4.6 Kepemilikan Manajerial dan opini audit *going concern*

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan antara manajer dengan pemilik. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (*congruance*)

kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faizal, 2004). Herawaty (2008) juga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai mekanisme *corporate governance* sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam memanipulasi laba. Dengan adanya kesalaran antara manajer dengan pemilik, maka kelangsungan hidup perusahaan akan terjaga karena antara manajer dan pemilik akan berusaha bersama-sama untuk memajukan perusahaannya.

Penelitian Dhaliwal *et al.* (1982), Morck *et al.* (1988), Warfield *et al.* (1995), dan Pratana dan Mas'ud (2003) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan *discretionary accruals* sebagai ukuran manajemen laba dan berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dan kandungan informasi dalam laba. Semakin besar kepemilikan manajerial maka akan semakin rendah praktek manipulasi laba yang terjadi dan adanya peningkatan kualitas informasi laporan keuangan karena manajer merasa memiliki perusahaan.

Parker *et al.* (2005) dalam Petronila (2007) menunjukkan bahwa hubungan antara kepemilikan anggota dewan dengan opini *going concern* berbanding terbalik. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka kemungkinan kecil kasus manipulasi data keuangan seperti manajemen laba yang akan mengganggu kelangsungan hidup perusahaan (Herawaty, 2008). Sehingga semakin besar saham yang dimiliki manajemen maka semakin rendah kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*.

Penelitian Petronila (2007) menemukan bukti bahwa ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Adanya

prosentase kepemilikan anggota dewan dalam perusahaan semakin besar maka anggota dewan tersebut akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Manajer merasa memiliki perusahaan sehingga berusaha untuk tetap dapat mempertahankan eksistensi perusahaan (kelangsungan hidup) dan berkembang melalui peningkatan pengendalian. Dengan demikian, semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka semakin kecil kemungkinan menerima opini audit *going concern*.

H6 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2.4.7 Komisaris Independen dan opini audit *going concern*

Keberadaan komisaris independen merupakan salah satu ciri khas dalam *Good Corporate Governance* (GCG) (Petronila, 2007). Tugas komisaris independen dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan adalah menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan serta mengawasi kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya komisaris independen diharapkan manajemen akan melaporkan informasi yang menggambarkan keadaan sebananya. Selain itu, komisaris independen juga diharapkan mampu memberikan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip utama untuk menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang sering terabaikan seperti pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya (Linoputri, 2010).

Penelitian oleh Dechow *et al.* (1996) dalam Herawaty (2008) menunjukkan bahwa perusahaan memanipulasi laba lebih besar kemungkinannya apabila memiliki Dewan Komisaris yang didominasi oleh manajemen dan lebih

besar kemungkinannya memiliki CEO yang merangkap menjadi *chairman of board*. Klein, (2002) dalam Santosa dan Wedari (2007) mengemukakan struktur dewan yang independen terhadap CEO sangat efektif dalam memonitor proses pelaporan akuntansi keuangan perusahaan. Sehingga dibutuhkan komisaris independen agar mengungkapkan informasi yang menggambarkan keadaan sebenarnya dan juga agar tidak terjadi manipulasi data keuangan.

Menurut Amirudin (2004) dalam Linoputri (2010), keanggotaan komisaris independen harus lebih dari jumlah (30%), sehingga dapat *outvoted* dalam pengambilan keputusan, hal ini apabila dihubungkan dengan adanya anggota komisaris yang tidak independen. Semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin kuat posisi komisaris independen dalam mempengaruhi keputusan yang diambil. Oleh karena itu, dengan adanya proporsi komisaris independen minimal 30% atau lebih banyak diharapkan dapat membawa pada pelaporan keuangan yang lebih berkualitas sehingga menghasilkan opini yang wajar tanpa pengecualian atau opini *non going concern* (Linoputri, 2010).

Penelitian Carcello an Neal (2000) dalam Linoputri (2010), menemukan bukti bahwa semakin besar persentase komisaris independen dalam komite audit semakin rendah kemungkinan penerimaan opini *going concern*. Hal ini sejalan dengan penelitian Petronila, (2007) yang menemukan bukti bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Keberadaan komisaris independen dapat menyeimbangkan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder*, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi auditor dalam

pemberian opini audit *going concern*. Dengan demikian semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*.

H7 : Proporsi komisaris independen yang lebih besar berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2.4.8 Komite Audit dan opini audit *going concern*

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Dalam masalah pengendalian komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan Dewan Komisaris dengan pihak manajemen (Nasution dan Setiawan, 2007 dalam Linoputri, 2010). Dengan adanya komite audit diharapkan adanya pengawasan yang efektif untuk memastikan rencana perusahaan telah dijalankan sebagaimana mestinya.

Komite audit berfungsi untuk meningkatkan fungsi audit internal dan eksternal serta meningkatkan kualitas laporan keuangan (Linoputri, 2010). Salterio (2001) dan Abbot (2004) dalam Masyitoh dan Adhariani, (2010) penelitian mereka menemukan bahwa komite audit dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam hubungannya karakteristik komite audit dan indikator kualitas dalam laporan keuangan. Komite audit akan selalu melakukan pengawasan selama proses pelaporan keuangan agar laporan yang dihasilkan dapat diandalkan.

McMullen (1996) dalam Santosa dan Wedari (2007) menunjukkan bahwa komite audit berhubungan dengan lebih sedikit tuntutan hukum pemegang saham

karena kecurangan dan tindakan ilegal. Auditor yang melihat adanya tuntutan hukum pemegang saham akan menilai hal tersebut sebagai salah satu faktor keraguan akan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga ia akan memberikan opini *going concern* pada perusahaan tersebut. Ramadhany (2004) mengemukakan bahwa Komite audit yang independen dapat membantu mengurangi tekanan manajemen untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) pada saat auditor merasa benar untuk mengeluarkan opini audit *going concern*. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Carcello dan Neal, (2000) dalam Ramadhany, (2004) yang menyatakan bahwa keberadaan *inside* dan *grey director* (komisaris/direktur yang berasal dari manajemen) dapat mengurangi kemungkinan penerimaan opini audit pada komite audit perusahaan yang mengalami *financial distress*. Semakin besar proporsi komite audit maka semakin kecil kemungkinan menerima opini audit *going concern*.

H8 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau sering disebut variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variable independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah opini audit (*Audit Opinion*). Opini Audit (AO) yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum (SPAP, 2001). Opini audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana bernilai 1 untuk opini *going concern* dan bernilai 0 untuk opini *non going concern*. Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang ditentukan (SPAP, 2001). Opini *going concern* dalam penelitian ini terdapat pada opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas dan wajar dengan pengecualian.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen atau sering disebut variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variable dependen. Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdapat delapan variabel independen

yang akan diuji terhadap opini *going concern* yang diterima perusahaan. Variabel independen tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.2.1 Kondisi Keuangan (*Financial Distress*)

Kondisi keuangan (*financial distress*) dapat didefinisikan sebagai suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan perusahaan selama periode tertentu yang digambarkan dengan mengalami laba bersih (*net profit*) negatif selama beberapa tahun yang akhirnya akan mengarah ke kebangkrutan. Kondisi keuangan diukur dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan *revised* Altman, yang terkenal dengan istilah Z score. Z score yang merupakan suatu formula yang dikembangkan oleh Altman untuk mendeteksi kebangkrutan perusahaan pada beberapa periode sebelum terjadinya kebangkrutan. Formulanya adalah:

$$Z' = 0.717Z_1 + 0.874Z_2 + 3.107Z_3 + 0.420Z_4 + 0.998Z_5$$

Keterangan:

$Z_1 = \text{working capital} / \text{total assets}$

$Z_2 = \text{retained earnings} / \text{total assets}$

$Z_3 = \text{earnings before interest and taxes} / \text{total assets}$

$Z_4 = \text{book value of equity} / \text{book value of debt}$

$Z_5 = \text{sales} / \text{total assets}$

Berdasarkan analisis ini apabila nilai Z dari perusahaan yang diteliti lebih kecil dari 1,80 berisiko tinggi terhadap kebangkrutan, bila nilai Z berada diantara 1,81 sampai dengan 2,99 dikatakan masih memiliki risiko kebangkrutan, bila di atas nilai 2,99 atau $Z > 2,99$ aman dari kebangkrutan.

Sampai dengan saat ini, *Z Score* model ini masih lebih banyak digunakan oleh para peneliti, praktisi, serta para akademis di bidang akuntansi dibandingkan model prediksi kebangkrutan lainnya (Altman, 1993 dalam Fanny dan Saputra 2005). Hal yang menarik mengenai *Z Score* adalah keandalannya sebagai alat analisis tanpa memperhatikan bagaimana ukuran perusahaan. Meskipun seandainya perusahaan sangat makmur, bila *Z Score* mulai turun dengan tajam, menunjukkan adanya indikasi bahwa perusahaan harus waspada terhadap kebangkrutan. Atau, bila perusahaan baru saja survive, *Z Score* bisa digunakan untuk membantu mengevaluasi dampak yang telah diperhitungkan dari perubahan upaya-upaya manajemen perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model prediksi kebangkrutan *revised Altman (Z score)*.

3.1.2.2 Debt Default

Debt default atau kegagalan membayar hutang didefinisikan sebagai kelalaian atau kegagalan perusahaan untuk membayar hutang pokok atau bunganya pada saat jatuh tempo (Chen dan Church, 1992). Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Kode 1 diberikan jika perusahaan dalam status *debt default*, dan 0 jika tidak *debt default*. Pada laporan keuangan, status *debt default* dapat dilihat dalam laporan auditor Independennya.

3.1.2.3 Opini Audit Tahun Sebelumnya (PO)

Opini audit tahun sebelumnya (*Prior Opinion*) adalah opini audit yang diterima *auditee* pada tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum tahun penelitian. Opini audit tahun sebelumnya ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu *auditee* dengan opini *going concern (Going Concern Audit Opinion)* dan tanpa opini *going*

concern (Non Going Concern Audit Opinion). Variabel diukur dengan menggunakan variabel dummy, 1 jika opini audit tahun sebelumnya adalah opini *going concern* dan 0 jika opini bukan *going concern*.

3.1.2.4 Kualitas Audit

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas seorang auditor untuk dapat menemukan dan melaporkan penyelewengan dalam sistem akuntansi klien (Christina, 2003 dalam Santosa dan Wedari, 2007). Dalam penelitian ini kualitas audit diproksikan dengan menggunakan auditor spesialisasi industri (*auditor industry specialization*). Variabel ini diukur dengan variabel dummy, 1 untuk auditor yang memiliki spesialisasi industri, dan 0 jika sebaliknya.

Spesialisasi industri auditor diproksikan dengan konsentrasi jasa auditor pada bidang tertentu. Pada penelitian ini pengukuran auditor spesialisasi industri (*auditor industry specialization*) diukur seperti pada penelitian Craswell et al (1995) dalam Januarti (2009), yaitu dengan proporsi penjualan *auditee* yang diaudit terhadap penjualan pada industri yang sama. Apabila proporsinya lebih dari 15% dikatakan spesialis dan sebaliknya.

3.1.2.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Beiner *et al*, 2003 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Kepemilikan

institusi diukur dengan menggunakan proporsi jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar.

3.1.2.6 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005). Secara teoritis ketika kepemilikan saham oleh manajerial tinggi maka kemungkinan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer sehingga kemungkinan kecil menerima opini audit *going concern*. Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah saham dalam perusahaan yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

3.1.2.7 Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan seperti definisi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), yaitu:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Proporsi komisaris independen dihitung dengan persentase komisaris independen dalam Dewan Komisaris.”

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang *listed* di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Komisaris independen diukur dengan menggunakan proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

3.1.2.8 Komite Audit

Sesuai dengan Keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep.Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa:

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan”.

Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) . Periode pengamatan dilakukan selama periode 2007-2009 agar lebih mencerminkan kondisi industri manufaktur saat ini. Sektor manufaktur dipilih untuk menghindari adanya *industrial effect* yaitu risiko industri yang berbeda antar suatu sektor industri yang satu dengan yang lain (Setyarno, dkk., 2006). Selain itu, sektor manufaktur dipilih karena sektor tersebut memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian dengan memberikan kontribusi yang paling besar dalam nilai ekspor Indonesia, serta memiliki tingkat kompetisi yang kuat sehingga rawan terhadap kasus-kasus kecurangan dan

masalah *going concern*. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Auditee sudah terdaftar di BEI sebelum 1 Januari 2007.
2. Auditee tidak keluar (*delisting*) dari BEI selama periode penelitian (2007-2009)
3. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen untuk yang berakhir 31 Desember selama periode tahun 2007-2009.
4. Mengalami laba bersih setelah pajak yang negatif sekurangnya dua periode laporan keuangan selama periode pengamatan (Tahun 2007 - 2009)
5. Perusahaan mengungkapkan informasi tentang Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit
6. Data yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap dan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dari tahun 2007–2009.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang sumbernya berasal dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2007-2009 dalam situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan tersedia di *database* Pojok BEI UNDIP, *JSX Statistics 2007-2009* serta *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)*. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan-perusahaan manufaktur sebagai *sample* karena sektor manufaktur dominan di

Asia, khususnya di Indonesia (Achmad *et al.*, 2009). Selain itu untuk menjaga homogenitas data maka penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur saja.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan auditan perusahaan yang dipublikasikan oleh BEI selama tahun 2007-2009 dan juga yang memuat proporsi kepemilikan dalam perusahaan, jumlah Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit serta informasi keuangan dan opini audit yang terdapat dalam laporan keuangan.

3.5 Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan *standard* deviasi.

3.5.2 Analisis Statistik Inferensial

Penelitian ini menggunakan analisis statistik inferensial untuk pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis multivariate dengan menggunakan regresi logistik (*logistic-regresion*), karena variabel bebasnya merupakan kombinasi antara *metric* dan *non metric* (nominal).

Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji sejauh mana probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independen. Pada teknik analisis regresi logistik tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2006). Regresi logistik juga mengabaikan *heteroscedacity*, artinya variabel dependen tidak memerlukan *homoscedacity* untuk masing-masing variabel independennya.

Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

$$GC = \alpha + \beta_1 \text{BANKRUPT} + \beta_2 \text{DEF} + \beta_3 \text{PO} + \beta_4 \text{ASPES} + \beta_5 \text{INS_OWN} + \beta_6 \text{MAN_OWN} + \beta_7 \text{IND_COMM} + \beta_8 \text{KOMITE} + \varepsilon \quad (3.2)$$

Keterangan :

GC : Dummy variabel opini audit (kategori 1 untuk audit dengan opini audit *going concern* (GCO) dan 0 untuk auditee dengan opini audit *non going concern* (NGCO)).

α : konstanta

BANKRUPT : Prediksi kebangkrutan menggunakan persamaan revised Altman

DEF : *Debt default* (variabel dummy, 1 jika perusahaan dalam keadaan *default*, dan 0 jika tidak)

PO : Opini tahun sebelumnya (variabel dummy, 1 jika opini *going concern*, 0 jika opini *non going concern*)

ASPES : Auditor industry specialization (variabel dummy, 1 jika auditor spesialis, 0 jika bukan auditor spesialis)

INS_OWNS : Persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar.

MAN_OWNS : Proporsi saham biasa yang dipegang oleh anggota Dewan Direksi

IND_COMM : Persentase komisaris independen dalam Dewan Komisaris

KOMITE : Jumlah komite audit dalam perusahaan.

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Menilai Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Model ini untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Adapun hasilnya jika (Ghozali, 2006):

1. Hal ini berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness fit model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's goodness of Fit Test* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak.
2. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya.

b. Menilai Model Fit (*Overall Model Fit Test*)

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah fit atau tidak dengan data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Dari hipotesis ini, agar model fit dengan data maka H0 harus diterima. Statistik yang digunakan berdasarkan *Likelihood*. *Likelihood L* dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternative, *L* ditransformasikan menjadi $-2 \text{ Log}L$. Output SPSS memberikan dua nilai $-2 \text{ Log}L$ yaitu satu untuk model yang hanya memasukkan konstanta saja dan satu model dengan konstanta serta tambahan bebas.

Adanya pengurangan nilai antara $-2\text{Log}L$ awal dengan nilai $-2\text{Log}L$ pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2006). *Log Likelihood* pada regresi logistik mirip dengan pengertian "*Sum of Square Error*" pada model regresi, sehingga penurunan model *Log Likelihood* menunjukkan model regresi yang semakin baik.

c. Estimasi Parameter dan Interpretasinya

Estimasi parameter dapat dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien regresi dari tiap variabel-variabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (*sig*). Apabila terlihat angka signifikan lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan pada

tingkat 5% maka berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. Begitu pula sebaliknya, jika angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat.